



**Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2015



Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Jakarta, Februari 2016



KATA PENGANTAR

Sebagai institusi yang memiliki komitmen menjadi institusi yang akuntabel, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Komitmen kerja yang harus dicapai Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Tahun 2015.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan tugas selama satu tahun, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2015. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE serta mitra kerja, dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL KSDAE,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal KSDAE berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Tahun KSDAE, dan Perjanjian Kinerja (PK).

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2015 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :

1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. Konservasi Spesies dan Genetik
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
5. Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
6. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
7. Pengelolaan Taman Nasional
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2015 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2015. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.

Evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 dilakukan melalui pengukuran kinerja terhadap sembilan IKP, di mana tiga diantaranya termasuk di dalam indikator yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen KSDAE tahun 2015. Beberapa kesimpulan atas pelaksanaan kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan IKP yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebesar 129,61% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara a. Nilai Ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting b. Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam c. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	5 T 10 M 38,3 M	5,31 T 14,54 M 121,83 M	133,84 106,15 145,37 317,81 (150)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat			130
		a. 10 KK meningkat	10 unit KK	11 unit KK	110
		b. 40 KK prakondisi	40 unit KK	119 unit KK	297,5 (150)
		Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat			125
a. 15 satwa meningkat	2%	26,89%	1.344 (150)		
b. 10 satwa prakondisi	100%	100%	100		
Rata-rata Capaian Kinerja Program					129,61

2. Rata-rata capaian kinerja sembilan IKP Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebesar 97,57%, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%
Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati					
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)				130
	a. 10 unit KK meningkat	KK	10	11	110
	b. 40 unit KK meningkat	KK	40	119	297,5 (150)
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	20	12	60
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013				125
	a. 15 satwa meningkat	%	2	26,89	1.344 (150)
	b. 10 satwa prakondisi	%	100	100	100
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	Unit	13	10	76,92
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	1	14,29
Rata-rata capaian IKP Sasaran 1					81,24
Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati					
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	Rp. Trilyun	5	5,31	106,15
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	210.136	84,05
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	3.500.000	4.038.070	115,37
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	Unit	25	38	152 (150)
Rata-rata capaian IKP Sasaran 2					113,89
Total rata-rata IKP					97,57

3. Secara umum pada tahun 2015 Ditjen KSDAE telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada IKP yang tertuang dalam PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2015, dari tiga IKP terdapat satu indikator yang realisasi kinerjanya melebihi target yaitu Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara, sedangkan dua IKP yang belum tercapai kinerjanya sesuai target adalah Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat dan Peningkatan satwa terancam punah prioritas. IKP Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat belum mencapai kinerja sesuai yang ditargetkan disebabkan belum adanya intervensi dalam upaya peningkatan efektivitas, sedangkan IKP

Peningkatan satwa terancam punah prioritas mencapai kinerja sesuai yang ditargetkan karena terdapat penurunan populasi pada beberapa satwa yaitu Gajah Sumatera, Anoa, dan Orangutan.

4. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2015, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pagu sebesar Rp. 1.590.879.426.000,-, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.438.933.254.093,- atau 90,45% (Sumber : SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 10 Februari 2016). Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempengaruhi terbitnya APNBP 2015 sehingga pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan mengalami penundaan, penataan pegawai yang baru selesai pada bulan Juli 2015, serta adanya SE MP PNBP 100% yang baru terbit pada tanggal 7 Desember 2015.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 diantaranya adalah : 1). adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan terjadinya perubahan pula pada organisasi Ditjen KSDAE, yang berpengaruh pada APNBP yang baru terbit bulan April 2015; 2). terkait kelembagaan Kementerian LHK (P.18/2015) penempatan personel baru selesai pada bulan Juli, sehingga baru mulai bekerja pada bulan Juli 2015; 3). Pencairan anggaran dengan sumber dana PNBP menunggu Surat Edaran Maksimal Pencairan (SE MP) PNBP, di mana SE PNBP 100% baru keluar pada tanggal 7 Desember 2015 melalui SE Nomor : 51/PB/2015 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan PSDH di lingkungan KLHK tahap VI, sehingga untuk pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan waktunya sangat terbatas; 4). pelaksanaan kegiatan di UPT terpecah pada tiga program yang harus dilaksanakan, yaitu pada Ditjen KSDAE, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, dan 5). pada Direktorat Kawasan Konservasi terdapat penambahan dana hibah KfW sebesar Rp. 19,2 Milyar yang baru masuk pada bulan September 2015, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.133.200.000,-, akan tetapi masih dalam proses pengesahan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain : 1). penataan pegawai terkait perubahan organisasi pada lingkup Ditjen KSDAE, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal; 2). memaksimalkan penyerapan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni karena pencairan anggarannya tidak dibatasi; 3). melakukan koordinasi dengan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran, khususnya pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem agar sinergis dengan program pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim; 4). pada hibah KfW Direktorat Kawasan Konservasi agar bisa segera didorong penyelesaiannya sehingga realisasi anggaran sebesar Rp. 9.133.200.000,- bisa diterbitkan SP3nya.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan,

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B KELEMBAGAAN	1
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	3
C SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG	4
1. Kawasan Konservasi	4
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Sarana Dan Prasarana	8
II PERENCANAAN KINERJA	9
A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	9
1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis	9
2. Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja 2015-2019	12
3. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015	20
B PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	21
III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
1. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	23
2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	25
a. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2015	25
b. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sembilan IKP	38
B REALISASI ANGGARAN	57
IV PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Nomenklatur Eselon II Ditjen KSDAE.....	3
Tabel 2	Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi.....	4
Tabel 3	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2015.....	5
Tabel 4	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	6
Tabel 5	Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015	6
Tabel 6	Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015	7
Tabel 7	Aset Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015.....	8
Tabel 8	Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019	12
Tabel 9	IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019	13
Tabel 10	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019	15
Tabel 11	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	15
Tabel 12	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019	16
Tabel 13	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	16
Tabel 14	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019	17
Tabel 15	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019	17
Tabel 16	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019 ..	19
Tabel 17	IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019	20
Tabel 18	Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2015	21
Tabel 19	Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2015.....	21
Tabel 20	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ditjen KSDAE Tahun 2015	25
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara	26
Tabel 22	Data NPBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahun 2011-2015	29
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat	31
Tabel 24	Kawasan Konservasi yang mencapai Nilai Persentase METT 70%	33
Tabel 25	Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi	34
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat	35
Tabel 27	Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas	35
Tabel 28	Data Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah	36
Tabel 29	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2015.....	38
Tabel 30	Capaian Indikator Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebanyak 130 Unit (Usaha Pariwisata Alam Sebanyak 100 Unit, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 25 Unit, Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Geothermal Sebanyak 5 Unit)	53
Tabel 31	Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2015	58
Tabel 32	Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015	58

Tabel 33	Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2015	59
Tabel 34	Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015	60
Tabel 35	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015	61
Tabel 36	Penyerapan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015	61
Tabel 37	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015	62
Tabel 38	Pagu dan Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015	62
Tabel 39	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2015 ...	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Gambar 2	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015	5
Gambar 3	Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015	5
Gambar 4	Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015 ..	7
Gambar 5	Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015	7
Gambar 6	Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita	10
Gambar 7	Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE	11
Gambar 8	Data Devisa TSL Tahun 2014 dan 2015	27
Gambar 9	Realisasi PNBPN TSL Tahun 2014-2015	28
Gambar 10	Realisasi PNBPN TSL Tahun 2011-2015	28
Gambar 11	Realisasi PNBPN Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahun 2014 dan 2015	29
Gambar 12	Aktivitas Pengolahan Barang Jadi Dari Kulit Reptil PT. ILW	30
Gambar 13	Pameran Produk Dari Kulit Reptil	30
Gambar 14	Rapat Pembahasan Penetapan Target Lokasi Peningkatan Nilai METT	32
Gambar 15	Sebaran Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%	33
Gambar 16	Orangutan di Sebabai, dok. BBTN Betung Kerihun	37
Gambar 17	Elang Jawa, dok. BTN Gunung Halimun Salak	37
Gambar 18	Peninjauan Lokasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Wilayah Kerja Mitra Swasta	45
Gambar 19	Focus Group Discussion Pengelolaan Ekosistem Esensial di Kabupaten Manggarai Barat	45
Gambar 20	Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat di BTN Bogani Nani Wartabone	47
Gambar 21	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015	48
Gambar 22	Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Rinjani	50
Gambar 23	Aktivitas pengunjung memandikan Gajah di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuseur	50
Gambar 24	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015	51
Gambar 25	Wisatawan Nusantara di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	52
Gambar 26	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan Air di Taman Nasional Gunung Merapi	55
Gambar 27	Potensi Panas Bumi yang Berada di Kawasan Konservasi Adalah Suoh, Kab. Lampung Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	57
Gambar 28	Grafik Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2010 – 2015	57
Gambar 29	Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2015 ..	59
Gambar 30	Persentase Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2010-2015 ..	60
Gambar 31	Persentase Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE 2010-2015	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Target Kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019	67
Lampiran 2	Indikator Kinerja Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2015	72
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2015	76
Lampiran 4	Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.357/KSDAE-SET/2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	78
Lampiran 5	Data Peningkatan Populasi 25 Satwa Terancam Punah Prioritas Tahun 2015	90
Lampiran 6	Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satker Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2015	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat selalu terpelihara kelestariannya dan mampu mewujudkan keseimbangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas penting dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu : 1). Perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2). Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 3). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menghadapi berbagai isu pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2015 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka perlu disusun Laporan Kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Ditjen KSDAE sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015 - 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015.

B. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Struktur Organisasi

Tahun 2015 merupakan tahun transisi yaitu adanya penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya penggabungan dua Kementerian menyebabkan perubahan organisasi secara besar-besaran di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perubahan yang terjadi pada Direktorat Jenderal KSDAE di mana sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), yaitu adanya pemisahan Ditjen PHKA menjadi tiga Eselon I, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Perubahan organisasi juga terjadi pada tingkat Eselon II Ditjen KSDAE. Jika sebelumnya struktur organisasi Ditjen PHKA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 jo Peraturan Menteri Kehutanan P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan maka selanjutnya didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan nomenklatur Eselon II adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perubahan Nomenklatur Eselon II Ditjen KSDAE

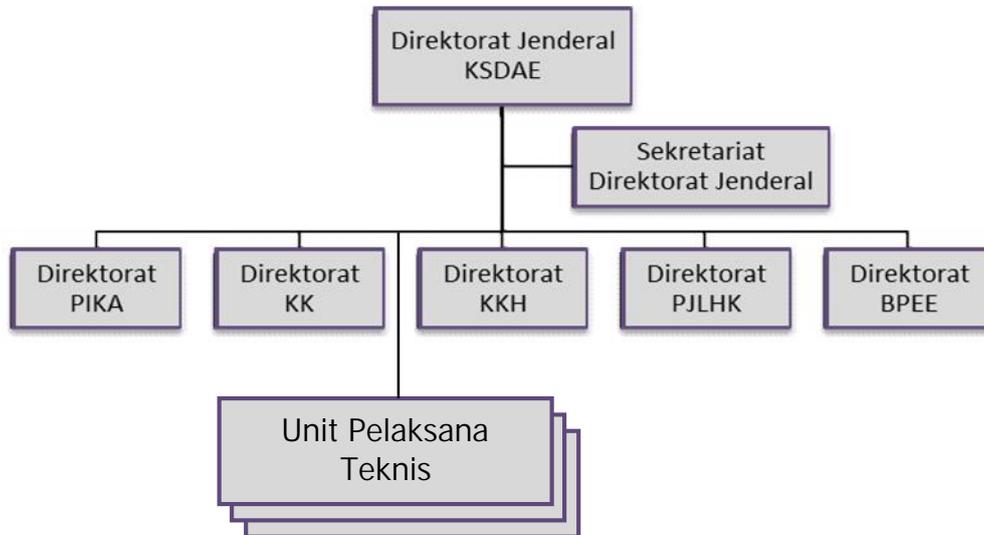
No	Permenhut No: P.40/Menhut-II/2010 jo Permenhut P.33/Menhut-II/2012	PermenLHK No: P.18/MENLHK-II/2015
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	Sekretariat Direktorat Jenderal
2	Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
3	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Direktorat Kawasan Konservasi
4	Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
5	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
6	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 77 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), sebagai berikut :

- a. Balai Besar KSDA : 8 UPT
- b. Balai Besar Taman Nasional : 8 UPT
- c. Balai KSDA : 19 UPT
- d. Balai Taman Nasional : 42 UPT

Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG

1. Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.108.486,54 ha yang terbagi dalam 521 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1	Cagar Alam	222	3.957.691,66
2	Cagar Alam Laut	5	152.610,00
3	Suaka Margasatwa	71	5.024.138,29
4	Suaka Margasatwa Laut	4	5.588,25
5	Taman Nasional	43	12.328.523,34
6	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7	Taman Wisata Alam	101	257.323,85
8	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
9	Taman Buru	13	220.951,44
10	Taman Hutan Raya	23	351.680,41
11	KSA-KPA	18	275.190,00
	Jumlah	521	27.108.486,54

Sumber : Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

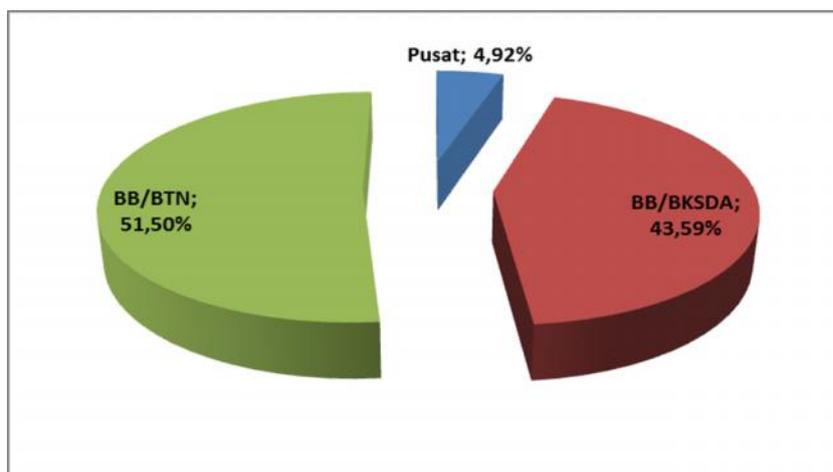
2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak 8.055 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2015

Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	396	4,92
BB/BKSDA	3.511	43,59
BB/BTN	4.148	51,50
Total	8.055	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 19 Januari 2016



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015
Perkembangan pegawai dalam enam tahun terakhir disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, jumlah pegawai Ditjen KSDAE terbanyak pada tahun 2011 dengan jumlah 8.582 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terjadi pada

BAB I PENDAHULUAN

tahun 2013 dengan jumlah 8.048 orang. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2015 mengalami penurunan daripada jumlah pegawai tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya promosi pegawai Ditjen KSDAE ke Eselon I lain, mutasi ke Eselon I lain, pensiun, dan meninggal dunia.

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
UPT	10	453	2.011	476	4.455	151	103	7.659
PUSAT	6	102	128	40	109	6	5	396
JUMLAH	16	555	2.139	516	4.564	157	108	8.055
%	0,20	6,89	26,55	6,41	56,66	1,95	1,34	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 19 Januari 2016

Pada tahun 2015, pegawai lingkup Ditjen KSDAE masih didominasi dari lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 4.564 orang (56,66%), lulusan S1/D4 sebanyak 2.139 orang (26,55%), S2 sebanyak 555 orang (6,89%), dan lulusan S3 sebanyak 16 orang (0,20%) dari seluruh pegawai yang ada.

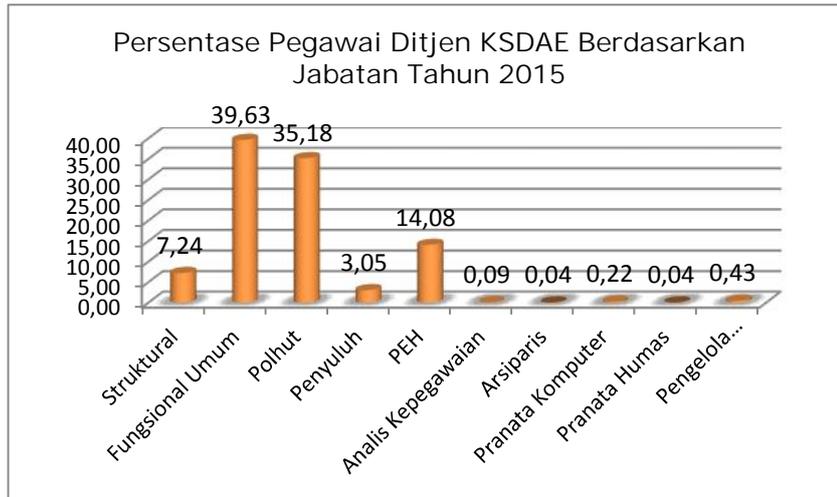
Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 3.192 orang (39,63%) dan Polisi Hutan sebesar 2.834 orang (35,18%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum ada, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	583	7,24
2	Fungsional Umum	3.192	39,63
3	Polhut	2.834	35,18
4	Penyuluh	246	3,05
5	PEH	1.134	14,08
6	Analisis Kepegawaian	7	0,09
7	Arsiparis	3	0,04
8	Pranata Komputer	18	0,22
9	Pranata Humas	3	0,04
10	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	35	0,43
	Jumlah	8.055	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 19 Januari 2016

BAB I PENDAHULUAN



Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015

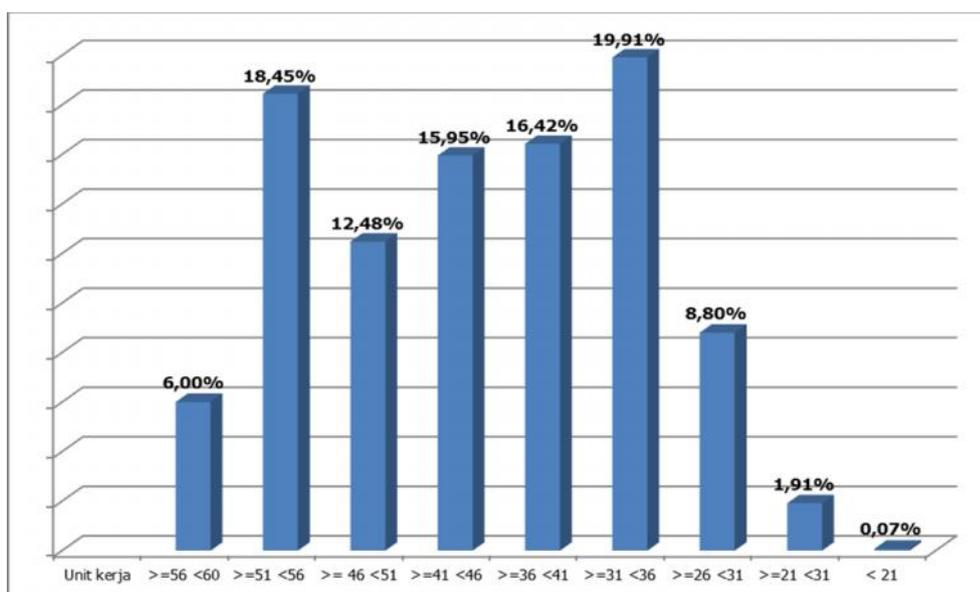
Dilihat dari komposisi umur, pegawai lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun dari UPT, maka komposisi tertinggi jumlah pegawai pada umur 51- 55 tahun sejumlah 1.469 orang (18,06%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur < 21 tahun sejumlah 6 orang (0,07%). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015

Unit kerja	>=56 <60	>=51 <56	>= 46 <51	>=41 <46	>=36 <41	>=31 <36	>=26 <31	>=21 <31	< 21	Jumlah
PUSAT	41	119	53	45	48	52	33	5		396
BB/BKSDA	252	684	491	565	558	666	238	55	2	3.511
BB/BTN	190	683	461	675	717	886	438	94	4	4.148
Jumlah	483	1.486	1.005	1.285	1.323	1.604	709	154	6	8.055
%	6,00	18,45	12,48	15,95	16,42	19,91	8,80	1,91	0,07	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 19 Januari 2016

Gambaran sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015

3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2015 dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi mencapai Rp. 1.595.496.206.868,-. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 terdiri atas :

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.111.488.820,-.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.554.477.806.458,-.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 23.906.911.590,-.

Nilai aset yang dikelola Ditjen KSDAE selama tahun 2010-2015 disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015

Tahun	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lancar (Rp.)	Aset Lainnya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2010	1.402.671.711.227	38.580.432.320	11.470.460.917	1.452.722.604.464
2011	1.709.179.793.561	23.187.404.046	17.974.748.917	1.750.341.946.524
2012	2.018.946.452.683	30.195.926.272	31.865.762.028	2.081.008.140.983
2013	1.572.956.197.178	23.364.689.829	15.882.519.783	1.612.203.406.790
2014	1.595.824.750.913	14.781.005.558	24.320.165.935	1.634.925.922.406
2015	1.554.477.806.458	17.111.488.820	23.906.911.590	1.595.496.206.868

Sumber : Setditjen KSDAE, 2015

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tahun 2015.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

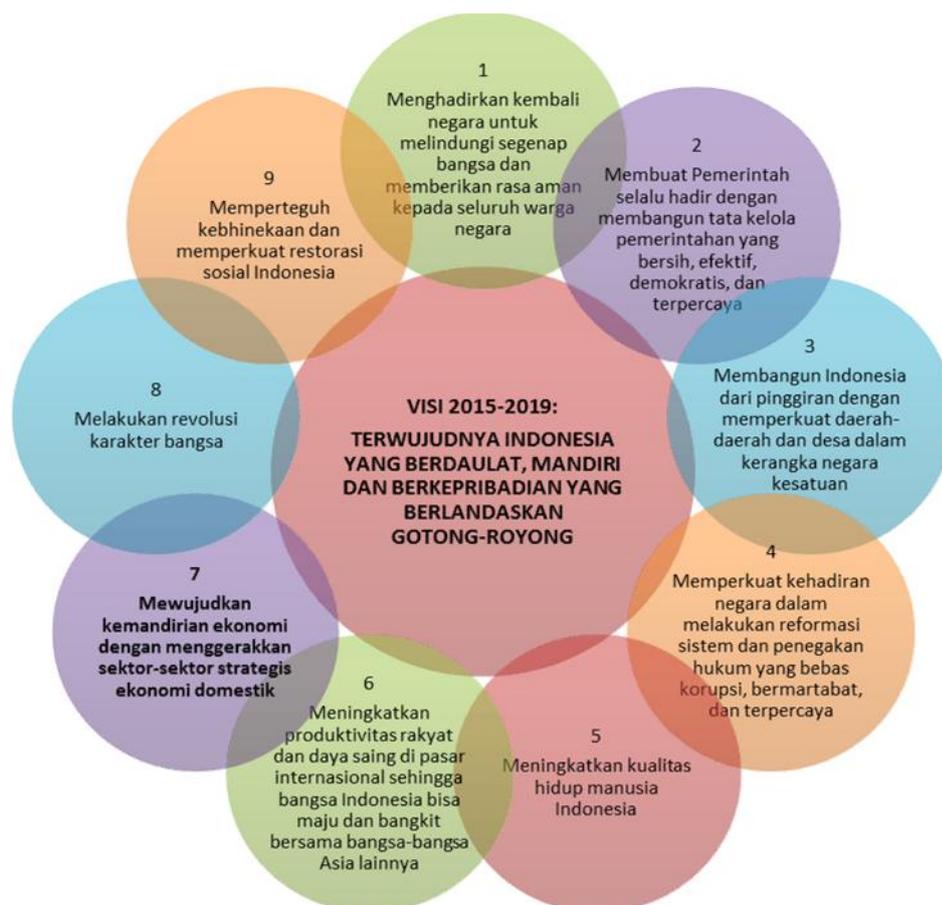
Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 6. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.



Gambar 6: Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :
"Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud, yaitu :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan, sebagaimana Gambar 7. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.



Gambar 7. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari tiga sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu : (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, sasaran program Ditjen KSDAE dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati
- b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

2. Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Tahun 2015-2019

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

Program	Tujuan	Sasaran (Outcome atau Hasil Yang diinginkan)	Impact (Dampak)	Indikator Kinerja Program
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem 	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)
				2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit
				3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Program	Tujuan	Sasaran (Outcome atau Hasil Yang diinginkan)	Impact (Dampak)	Indikator Kinerja Program
			penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013
		Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati		4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun
				5. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara
				6. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara
				7. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara
				8. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit
				9. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)

Adapun tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati						
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50	100	150	200	260
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20	100	100	100	100
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam	2	4	6	8	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
	punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013					
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13	26	39	43	48
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7	7	7	7	7
Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati						
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	5	10	15	20	25
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,25	1,5
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	25	51	77	103	130

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :

- 1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3) Konservasi Spesies dan Genetik
- 4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
- 5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
- 6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- 7) Pengelolaan Taman Nasional
- 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut.

1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diuraikan pada Tabel 10.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100

2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan pada Tabel 11.

Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34

3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik diuraikan pada Tabel 12.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 2013	2	4	6	8	10
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10	20	30	40	50
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	5	10	15	20	25
5.	Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
7.	Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1	3	5	7	10
8.	Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4	8	12	16	20
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1	1	1	1	1
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50

4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi diuraikan pada Tabel 13.

Tabel 13. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial diuraikan pada Tabel 14.

Tabel 14. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diuraikan pada Tabel 15.

Tabel 15. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
6.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai	50	100	150	200	260

BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia					
7.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
8.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
9.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
10.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
11.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
12.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
13.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
14.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
15.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
16.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
17.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
18.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
19.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20	40	60	80	100
20.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
21.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
22.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
23.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
24.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai/Balai Besar Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional diuraikan pada Tabel 16.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 16. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10	20	30	40	50
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50	50	50	50	50
4.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
5.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
6.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10	20	30	40	50
7.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
8.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50	50	50	50	50
9.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
10.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
11.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
13.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
14.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
15.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
16.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
17.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
18.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
19.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
20.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2
21.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
22.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

BAB II PERENCANAAN KINERJA

8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan pada Tabel 17.

Tabel 17. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) pelaksanaan kinerja secara indikatif dari Program KSDAE sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 diuraikan dalam Lampiran 1. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/output), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

3. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kinerja (performance) dan akuntabilitas (accountability) penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Ditjen KSDAE menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2015 telah disusun sebagai Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Matrik Renja Ditjen KSDAE tahun 2015 selengkapnyanya disampaikan pada lampiran 2.

Total pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.590.879.426.000,-. Pagu anggaran ini untuk membiayai kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

pada 83 Satker yaitu 6 Satker pusat, 27 Satker KSDA, dan 50 Satker Taman Nasional. Dengan rincian pagu anggaran per Satker Ditjen KSDAE tahun 2015 sebagaimana Tabel 18.

Tabel 18. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)
1	SEKRETARIAT DITJEN KSDAE	40.701.911.000
2	DIREKTORAT PIKA	15.741.377.000
3	DIREKTORAT KK	27.200.000.000
4	DIREKTORAT KKH	26.987.118.000
5	DIREKTORAT PJLHK	17.439.729.000
6	DIREKTORAT BPEE	18.341.243.000
7	BALAI BESAR/BALAI KSDA (27 satker)	647.819.727.000
8	BALAI BESAR/BALAI TN (50 satker)	783.275.947.000
-	SATUAN KERJA LAMA (PHKA)	13.372.374.000
	TOTAL	1.590.879.426.000

Sumber : Setditjen KSDAE, 2015

Anggaran tersebut merupakan pagu alokasi anggaran terakhir setelah dilakukan beberapa kali revisi dan penambahan pagu hibah luar negeri, dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi APBN-P tanggal 29 Juli 2015 dengan pagu sebesar Rp. 1.547.011.816.000,-;
- Revisi Antar Program tanggal 8 September 2015 dengan tambahan pagu sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan Hibah Luar Negeri Sebesar Rp. 19.200.000.000,- dengan total pagu menjadi Rp. 1.586.211.816.000,-; dan
- Hibah Langsung pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati) sebesar Rp. 4.667.610.000,-, sehingga total pagu alokasi anggaran terakhir adalah Rp. 1.590.879.426.000,-.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 disampaikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkatkan Populasi Spesies Terancam Punah Meningkatkan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2015 tidak mencantumkan target atas indikator kinerja, sehingga target indikator kinerja didasarkan pada target indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019, Renja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015, serta dokumen lainnya.

Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam Lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Pada tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2014 lingkup Ditjen PHKA. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi ditungkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Pada tahun 2014, Ditjen PHKA memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90).

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2014 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

a. Dalam perencanaan terdapat kelemahan :

- 1) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra belum disajikan, yang tertuang dalam Renstra hanya indikator kinerja kegiatan.
- 2) Renstra belum memuat target jangka menengah.
- 3) Penulisan besaran target pada laporan Renstra belum konsisten.
- 4) Tujuan dan sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil atau masih berorientasi proses.
- 5) Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 6) Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu tidak berdasarkan basis data yang up to date.
- 7) Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.
- 8) Dokumen PK belum sepenuhnya menyajikan IKU.
- 9) Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.
- 10) Rencana aksi atas kinerja belum memuat target secara periodik.

b. Dalam pengukuran kinerja terdapat kelemahan :

- 1) Mekanisme pengumpulan data kinerja pada sebagian unit kerja belum disusun dalam SOP, melainkan dilakukan oleh tim ad hoc.
- 2) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan.
- 3) IKU belum menggambarkan hasil atau masih menggambarkan proses.
- 4) Data yang dikumpulkan belum berdasarkan suatu mekanisme yang terstruktur.
- 5) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
- 6) IKU telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.
- 7) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

c. Dalam pelaporan kinerja terdapat kelemahan :

- 1) Terdapat indikator kinerja yang belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis.
- 2) Penyajian informasi keuangan belum terkait dengan pencapaian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan, antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
 - 4) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- d. Evaluasi kinerja terdapat kelemahan :
- 1) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
 - 2) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.
 - 3) Hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja.
 - 4) Terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Itjen yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja.
 - 5) Terdapat hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang belum diperbaiki oleh unit kerja.
- e. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi terdapat kelemahan :
- 1) Target IKU tidak seluruhnya tercapai.
 - 2) Capaian kinerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar Renstra tahun 2015-2019 direviu secara berkala untuk melihat progres pencapaian target atas rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Terhadap komponen pengukuran kinerja agar pengukuran kinerja dilakukan berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.
- c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam LKj dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki.
- e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk diketahui hambatan dan penyelesaiannya secara lebih cermat dalam menetapkan IKU.

Terhadap hasil penilaian evaluasi dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal, Ditjen KSDAE telah melakukan perbaikan yaitu :

- a. Telah disusun Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 dengan menggunakan indikator kinerja yang berjenjang, terukur dengan baseline yang jelas, dan lebih berorientasi hasil;
- b. Telah dilakukan reviu terhadap dokumen LKj seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE serta melakukan pemeringkatan atas dokumen LKj tersebut;
- c. Telah dilakukan review IKK melalui rapat-rapat triwulanan guna mendorong peningkatan pencapaian kinerja.

2. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

a. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2015

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015. Terdapat dua sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Ditjen KSDAE yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja masing-masing sasaran strategis/outcome Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 adalah pada Tabel 20.

Tabel 20. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Ditjen KSDAE Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara			133,84
		a. Nilai Ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	5 T	5,31 T	106,15
		b. Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	10 M	14,54 M	145,37
		c. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	38,3 M	121,83 M	317,81 (150)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat			130
		a. 10 KK meningkat	10 unit KK	11 unit KK	110
		b. 40 KK prakondisi	40 unit KK	119 unit KK	297,5 (150)
		Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat			125
		a. 15 satwa meningkat	2%	26,89%	1.344 (150)
		b. 10 satwa prakondisi	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program					129,61

Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (93,54%), sehingga ada peningkatan sebesar 38,56%. Namun pembedungan peningkatan masing-masing IKP tidak dapat disajikan seluruhnya karena terdapat IKP yang merupakan IKP baru yang belum ditetapkan menjadi IKP sebelumnya. Adapun penjelasan capaian setiap indikator kinerja sasaran disampaikan berikut ini.

Indikator Kinerja Sasaran 1 : Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara

Dalam rangka mendukung salah satu sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara. Indikator tersebut diukur melalui tiga indikator di bawahnya yaitu :

- 1) Besaran penerimaan devisa negara dari nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting;
- 2) Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam; dan
- 3) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Capaian indikator kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2015 disampaikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara			133,84
a. Nilai Ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	5 T	5,31 T	106,15
b. Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	10 M	14,54 M	145,37
c. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	38,3 M	121,83 M	317,81 (150)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

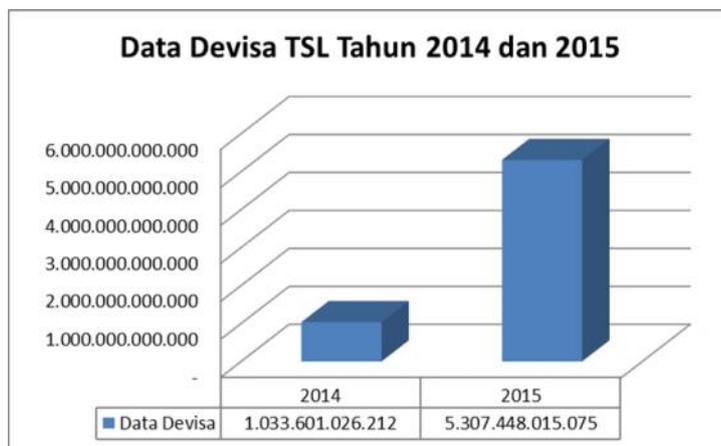
Berdasarkan capaian tiga indikator tersebut di atas, maka rata-rata capaian kinerja untuk indikator Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara adalah sebesar 133,84%. Penjelasan atas capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.307.448.015.075,-. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 (Rp. 5 Trilyun), maka capaian kinerja sebesar 106,15%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (Rp. 25 Trilyun), maka capaian kerjanya adalah sebesar 21,23%.

Nilai ekspor tersebut didapatkan dari laporan setiap perusahaan pengekspor TSL setiap bulannya yang dilengkapi dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau invoice perusahaan tersebut.

Kegiatan pendukung pencapaian target devisa negara dari bidang pemanfaatan TSL adalah dibuatnya surat edaran Direktur Jenderal KSDAE mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk menyampaikan laporan devisa setiap tanggal 5 setiap bulannya dan apabila belum memberikan laporan devisa maka pengajuan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa ke Luar Negeri (SATS-LN) perusahaan yang bersangkutan akan ditunda sementara.

Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) atau Devisa TSL tahun 2015 meningkat 413,49% dari data devisa tahun 2014 (Rp. 1.033.601.026.212,-). Perbandingan data devisa TSL tahun 2014 dan 2015 disampaikan pada Gambar 8.



Gambar 8.
Data Devisa TSL
Tahun 2014 dan
2015

Penyebab keberhasilan pencapaian target devisa tahun ini yaitu diantaranya adanya aksi terobosan yang dilakukan yaitu dengan membuat surat edaran mengenai kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan devisa, melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan asosiasi mengenai kewajiban menyampaikan laporan devisa.

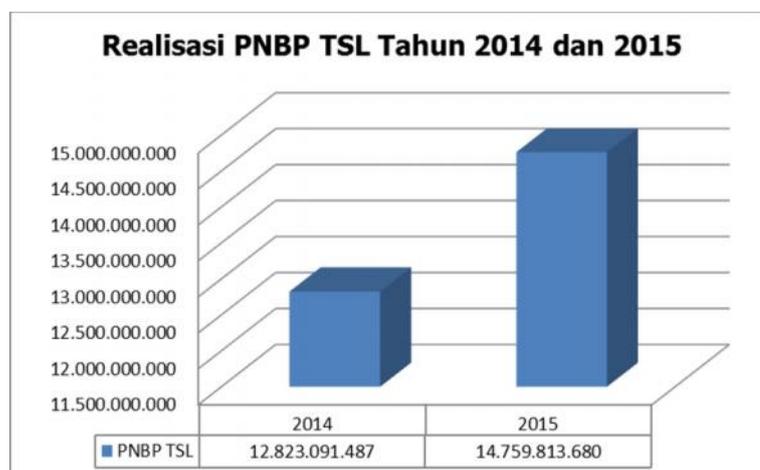
- 2) Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam adalah sebesar Rp. 14.536.516.402,-. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 (Rp. 10 Milyar), maka capaian kinerja sebesar 145,37%. Sedangkan jika dibandingkan target 5 tahun (Rp. 50 Milyar), maka capaian kerjanya adalah sebesar 29,07%.

Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL didapatkan dari iuran usaha pemanfaatan TSL, izin pengedar luar negeri, izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL (blanko SATS-LN) serta PNBP yang berasal dari laporan UPT baik Balai Besar/Balai KSDA maupun Balai Besar/Balai Taman Nasional.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

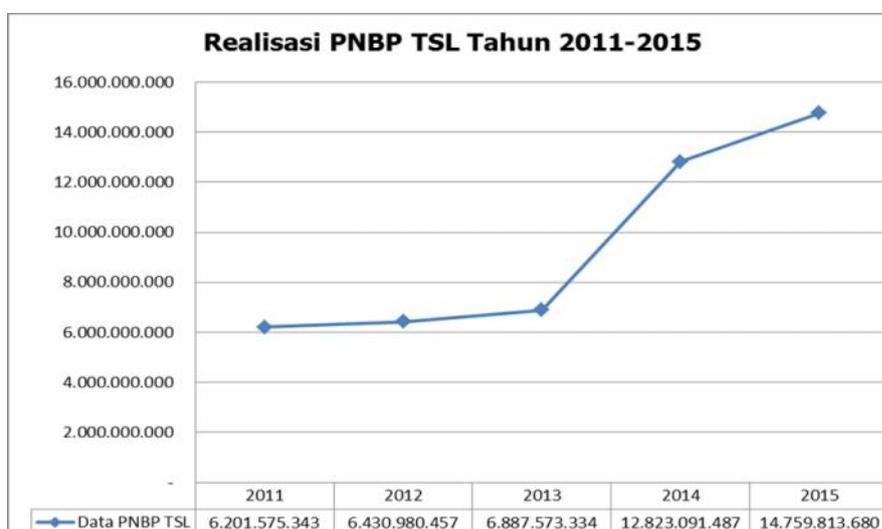
Pencapaian kinerja dari PNBP didukung dengan adanya surat edaran Direktur KKH kepada seluruh Kepala UPT untuk melaporkan pencapaian PNBP dari bidang TSL setiap bulannya kepada Direktorat KKH serta melakukan sosialisasi kepada semua pihak.

Realisasi PNBP TSL tahun 2015 meningkat 15,10% dari realisasi PNBP tahun 2014 (Rp. 12.823.091.487,-). Perbandingan realisasi PNBP TSL tahun 2014 dan 2015 disampaikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Realisasi PNBP TSL Tahun 2014-2015

PNBP TSL tahun 2015 merupakan data paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Perbandingan data PNBP TSL tahun 2011-2015 disampaikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Realisasi PNBP TSL Tahun 2011-2015

- 3) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2015 adalah sebesar Rp. 121.829.818.445,-. Jika dibandingkan dengan target PNBP tahun 2015 (Rp. 38,3 Milyar), maka capaian kinerja sebesar 317,81%, karena ada pembatasan nilai capaian maka capaian kinerjanya sebesar 150%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (Rp. 106.386.591.937,-), maka capaian kinerjanya sebesar 114,52%.

Target PNBP pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Undang Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 serta Surat Sekretaris Ditjen KSDAE kepada seluruh Satker lingkup Ditjen PHKA dengan Nomor : S.3155/SET-4/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penyesuaian Target PNBPN PHKA 2015.

Nilai PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 178,74% dibandingkan nilai PNBPN tahun 2014 (Rp. 68.160.929.054,-). Perbandingan realisasi PNBPN pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2014 dan 2015 disampaikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Realisasi PNBPN Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahun 2014 dan 2015

Data perbandingan nilai PNBPN tahun 2011-2015 adalah sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Data NBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahun 2011-2015

No.	Jenis PNBPN	Jumlah PNBPN Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PIPPA	102.922.500	357.718.000	55.788.000	6.540.410.000	3.471.265.000
2	IHUPA	118.212.233	188.262.278	241.623.598	257.082.092	657.813.729
3	PMOWA	26.679.137.821	20.039.871.992	36.073.742.293	61.363.436.962	117.520.539.716
4	PHUJWA	N/A	N/A	N/A	N/A	60.350.000
5	IIPJWA	N/A	N/A	N/A	N/A	19.000.000
6	IIPUPAEA	N/A	N/A	N/A	N/A	100.850.000
Jumlah (Rp.)		26.900.272.554	20.585.852.270	36.371.153.891	68.160.929.054	121.829.818.445

Sumber : Direktorat PHLK, 2015

Nilai PNBPN bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi diperoleh melalui:

- Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
- Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA)
- Pungutan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
- Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA)
- Iuran Izin Penyedia Jasa Wisata Alam (IIPJWA)
- Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air (IPUPAEA)

Keberhasilan atau peningkatan jumlah PNBPN disebabkan karena peningkatan jumlah pengunjung ke kawasan konservasi serta adanya penyesuaian/kenaikan tarif masuk obyek wisata alam dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Belum terlaksananya penyesuaian harga patokan TSL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2014, disebabkan belum adanya Peraturan Menteri sebagai turunannya.
- 2) Menurunnya jumlah wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2014 jumlah wisatawan nusantara 6.166.601 orang, wisatawan mancanegara 526.957 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara 4.038.070 orang, jumlah wisatawan mancanegara 210.136 orang.

Upaya tindak lanjut untuk penyelesaian masalah adalah :

- 1) Melakukan usulan revisi harga patokan TSL setiap tahun.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata alam.
- 3) Meningkatkan promosi wisata alam.

Outcome yang diperoleh dari capaian indikator ini adalah meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang berdampak pada meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



Gambar 12. Aktivitas Pengolahan Barang Jadi Dari Kulit Reptil PT. ILW



Gambar 13. Pameran Produk Dari Kulit Reptil

Indikator Kinerja Sasaran Ke-2 :
a. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat			130
a. 10 KK meningkat	10 unit KK	11 unit KK	110
b. 40 KK prakondisi	40 unit KK	119 unit KK	297,5 (150)

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia banyak menghadapi permasalahan baik bersifat eksternal berupa ancaman aktivitas yang merusak kawasan (penebangan liar, perambahan, perburuan satwa liar dan lain lain), maupun karena masalah internal, yaitu lemahnya kapasitas pengelolaan.

Pihak pengelola pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi dalam mengelola kawasan konservasi tersebut, namun mendapat kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan, prioritas alokasi sumber daya, serta mengetahui apakah pengelolaan yang dijalankan sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan. Oleh karena perlu suatu sistem untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, sehingga memungkinkan pihak pengelola untuk menerapkan adaptive management sesuai kebutuhan pengelolaan dari waktu ke waktu berdasarkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan. Kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini di Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga pengelolaan menjadi tidak terarah, tidak efektif dan tidak efisien dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu framework yang dikembangkan untuk penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia adalah Management Effectiveness Tracking Tool (METT).

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, salah satu indikator kinerja yang ditetapkan adalah Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar). Dalam upaya pencapaian indikator tersebut, Ditjen KSDAE menetapkan empat hal yang menjadi target yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbaikan Form METT;
- 2) Penetapan minimal 130 unit target lokasi;
- 3) Penetapan Nilai Awal METT; dan
- 4) Penilaian METT.

Tahapan kegiatan yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2015 dalam rangka upaya peningkatan nilai METT diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan form METT dilakukan melalui serangkaian diskusi dengan melibatkan pakar, mitra dan para pihak yang memiliki keahlian dan perhatian di bidang konservasi alam, hasil akhir kegiatan tersebut adalah dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai panduan dalam melakukan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelestarian Alam di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.15/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015.

- 2) Penetapan lokasi target peningkatan nilai METT melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.234/KSDAE-KK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang lokasi kawasan konservasi yang menjadi target peningkatan nilai METT tersebut, dengan rincian Taman Nasional 50 unit, Cagar Alam 116 Unit, Suaka Margasatwa 45 Unit, Taman Wisata Alam 80 Unit, Tahura 12 Unit dan Taman Buru 4 Unit. Sehingga jumlah total kawasan konservasi menjadi 307 unit.



Gambar 14. Rapat Pembahasan Penetapan Target Lokasi Peningkatan Nilai METT

- 3) Penilaian awal melalui serangkaian Workshop Penilaian yaitu workshop penilaian di Bandung pada tanggal 18 – 21 Oktober 2015, workshop penilaian di Medan tanggal 9 – 10 November 2015, workshop penilaian di Palu tanggal 11 – 13 November 2015, workshop penilaian di Denpasar tanggal 18 – 21 November 2015 dan workshop penilaian di Bogor pada tanggal 8 – 11 Desember 2015.
- 4) Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebanyak 130 Kawasan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015.
- 5) Perumusan bentuk-bentuk intervensi manajemen yang dibutuhkan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai METT, sehingga diharapkan pada penilaian akhir akan didapat 260 unit kawasan konservasi yang mendapatkan nilai minimal 70%.

Capaian kinerja indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat dilaksanakan melalui dua indikator kegiatan, yaitu :

- 1) Penilaian awal, terdapat 11 unit KK yang mencapai nilai minimal 70% seperti disajikan pada tabel di bawah. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, yaitu 10 unit KK, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 110%.
- 2) Kegiatan prakondisi yang telah dilaksanakan pada 119 unit KK, jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 40 unit KK, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 297,5%, dan karena ada pembatasan besaran capaian kinerja maka capaian kinerjanya adalah sebesar 150%.

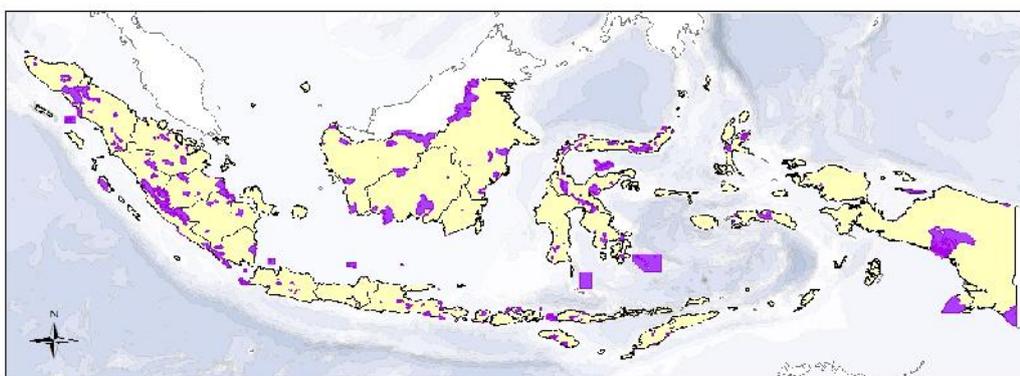
Data penilaian awal pada 130 unit KK disampaikan dalam Lampiran . Berdasarkan atas dua capaian kinerja tersebut di atas, maka rata-rata capaian kinerja pada indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat adalah sebesar 130%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 24. Kawasan Konservasi yang mencapai Nilai Persentase METT 70%

No	Jenis KK	Nama Kawasan	Nilai % METT
1	TN	Gunung Gede Pangrango	80
2	TN	Ujung Kulon	77
3	TN	Alas Purwo	75
4	TN	Bali Barat	73
5	TN	Bantimurung Bulusaraung	72
6	TN	Gunung Halimun Salak	71
7	TN	Danau Sentarum	70
8	TN	Wasur	70
9	TNL	Wakatobi	74
10	TNL	Kepulauan Seribu	71
11	TNL	Karimun Jawa	77

Sumber : Direktorat KK, 2015



Gambar 15. Sebaran Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Di mana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan yaitu :

- 1) Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan para pihak yang terlibat.
- 2) Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- 3) Alokasi sumber daya (input), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
- 4) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses).
- 5) Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan.
- 6) Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.14/KSDE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019. Tahapan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KK seperti disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan					Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat						
2	Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
3	Penetapan nilai awal METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
4	Penilaian METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						
5	Upaya Peningkatan Efektivitas	Pusat dan UPT BKSDA / BTN						

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 difokuskan pada kegiatan-kegiatan prakondisi dan belum ada kegiatan intervensi dalam upaya peningkatan efektivitas, sehingga hanya 11 KK yang memenuhi target capaian nilai METT 70%. Setelah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebanyak 130 Kawasan, yang dilampiri dengan arahan dan perumusan bentuk-bentuk intervensi manajemen yang dibutuhkan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai METT, diharapkan akan ada peningkatan nilai METT pada tahun berikutnya.

Permasalahan dalam peningkatan nilai METT selain disebabkan faktor internal juga disebabkan faktor eksternal di luar UPT, seperti alokasi sumber daya menunggu formasi dari Biro Kepegawaian, dan penataan batas menunggu pelaksanaan kegiatan dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain merumuskan bentuk-bentuk intervensi manajemen yang dibutuhkan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai METT.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi yang berdampak pada melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Sasaran Ke-2 :
b. Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat			125
a. 15 satwa meningkat	2%	26,89 %	1.344 (150)
b. 10 satwa prakondisi	100 %	100 %	100

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kelimpahan serta jumlah jenis yang banyak dari tumbuhan dan satwa liar Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia.

Dengan keanekaragaman hayati yang begitu besar, Pemerintah harus menetapkan prioritas dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan keterancamannya species tersebut yang dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi. Untuk memaksimalkan kinerja Pemerintah dengan sumberdaya (manusia, waktu, anggaran) yang terbatas tersebut maka ditetapkan salah satu sasaran strategis untuk kurun waktu 5 tahun (RPJM 2015-2019 dan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019), melalui indikator Peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas sesuai dengan IUCN Redlist sebesar 10%.

Daftar 25 satwa terancam punah prioritas yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK. 180/IV-KKH/2015 adalah sebagaimana pada Tabel 27.

Tabel 27. Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas

No	Satwa	No	Satwa	No	Satwa
1	Harimau Sumatera	10	Maleo	18	Surili
2	Gajah Sumatera	11	Babi Rusa	19	Tarsius
3	Badak	12	Anoa	20	Monyet Hitam Sulawesi
4	Banteng	13	Elang	21	Julang sumba
5	Owa	14	Kakatua	22	Nuri Kepala Hitam
6	Orangutan	15	Macan Tutul Jawa	23	Penyu
7	Bekantan	16	Rusa Bawean	24	Kanguru Pohon
8	Komodo	17	Cendrawasih	25	Celepuk Rinjani
9	Jalak Bali				

Sumber : Direktorat KKH, 2015

Peningkatan populasi diartikan sebagai bertambahnya jumlah individu dalam suatu kelompok/populasi dari suatu populasi satwa prioritas. Penambahan jumlah populasi dihitung dari kelahiran di alam yang termonitor (langsung maupun tidak langsung) dikurangi kematian. Pelepasliaran tidak dihitung langsung sebagai penambahan populasi, tetapi anakan yang berkembang dari hasil pelepasliaran (baik dari penangkaran maupun translokasi dari pusat rehabilitasi) dapat dihitung sebagai penambahan populasi. Diharapkan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas yang sebagian besar merupakan flagship species, spesies lain yang ada di habitat yang sama akan terjamin kelestariannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mencapai indikator Peningkatan populasi satwa terancam punah prioritas, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Menetapkan 25 satwa terancam punah yang akan menjadi target peningkatan populasi selama 2015-2019 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK. 180/IV-KKH/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penetapan Dua Puluh Lima Satwa Terancam Punah Prioritas Untuk Ditingkatkan Populasinya Sebesar 10% Pada Tahun 2015-2019.
- b) Mengumpulkan para Species Specialist Group untuk merumuskan scenario peningkatan populasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun manajemen.
- c) Telah dibentuk 4 (empat) kelompok Species Specialist Group (SSG) yaitu :
 - SSG Mamalia Besar
 - SSG Primata
 - SSG Burung
 - SSG Komodo dan Penyu
- d) Menyusun Roadmap Peningkatan populasi 25 satwa terancam prioritas sesuai IUCN redlist sebesar 10 %.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja peningkatan Pada tahun 2015, telah terkumpul data penambahan populasi untuk 15 satwa terancam punah prioritas pada site monitoring yang telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen KSDAE nomor 180/IV-KKH/2015. Dari perhitungan rata-rata peningkatan populasi 15 satwa terancam punah prioritas tersebut tahun 2015, adalah sebesar 26,89 %. Jika dibandingkan target tahun 2015 (2%), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 1.344 %. Rekap data peningkatan populasi satwa terancam punah tahun 2015 pada disampaikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Data Peningkatan Populasi Satwa Terancam Punah

No	Satwa	Data yang diupdate			Peningkatan (%)
		Baseline (ekor)	Populasi terbaru (ekor)	Peningkatan/Penurunan (ekor)	
1	Harimau sumatera	30	35	5	28,57
2	Gajah sumatera	84	52		-25,24
3	Badak	70	75	5	4,31
4	Banteng	47	47	0	0,00
5	Owa	21	25	4	19,05
6	Orangutan	143	102	-41	-23,39
7	Bekantan	455	458	3	0,66
8	Komodo	6	22	16	266,67
9	Jalak Bali	7	8	1	14,29
10	Maleo	446	994	548	133,74
11	Babi Rusa	39	33	-6	-12,82
12	Anoa	59	33	-26	-42,61
13	Elang	11	11	0	0,00
14	Tarsius	82	86	4	4,88
15	Monyet Hitam Sulawesi	31	34	3	9,68
Rata-rata peningkatan populasi Tahun 2015					26,89
Capaian kinerja (target 2%)					1.344 (150)

Sumber : Dit. KKH, 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan populasi tertinggi terjadi pada satwa Komodo (266,67%), Maleo (133,74%), dan Harimau Sumatera (28,57%). Selain peningkatan, terjadi pula penurunan populasi pada beberapa satwa yaitu Anoa (-42,61%), Gajah Sumatera (-25,24%), dan Orangutan (-23,39%). Penurunan populasi satwa diindikasikan karena beberapa hal antara lain, berkurangnya habitat satwa tersebut terutama untuk Gajah dan orangutan, karena banyaknya tumpang tindih habitatnya dengan hutan produksi dan perkebunan kelapa sawit, yang seringkali menimbulkan konflik dan berujung pada kematian. Selain itu beberapa kasus perburuan dan perdagangan ilegal satwa masih juga ditemukan. Data peningkatan populasi satwa terancam punah selengkapnya disampaikan pada Lampiran 5.



Gambar 16. Orangutan di Sebabai,
Dok. BBTN Betung Kerihun



Gambar 17. Elang Jawa,
Dok. BTN Gunung Halimun Salak

Untuk tahun 2015 ini mengingat adanya kendala beberapa satwa belum mempunyai baseline data serta beberapa taxa besar yang masa kehamilannya saja memerlukan waktu lama (lebih dari 1 tahun) sehingga belum dapat diukur kenaikan populasinya dalam kurun waktu 1 tahun. Berkenaan dengan hal tersebut untuk dapat mencerminkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ditjen KSDAE dalam menaikkan populasi satwa terancam punah prioritas, maka disusun target terlaksananya kegiatan pra kondisi peningkatan populasi satwa terancam punah sebesar 100%. Sebagaimana yang tertuang di dalam SK Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor : 180/IV-KKH/2015, kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan populasi 25 satwa terancam punah prioritas adalah sebagai berikut :

- Pembinaan populasi/habitat
- Penanggulangan konflik
- Perlindungan dan pengamanan
- Penyadartahuan
- Rehabilitasi dan Pelepasliaran
- Pengelolaan dan Pengembangan pangkalan data

Berdasarkan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan di atas, maka capaian untuk 10 satwa terancam punah prioritas sisanya adalah 100 %.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

b. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sembilan IKP

Sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, terdapat dua sasaran dan sembilan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE. Agar terdapat kesinambungan data capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun berikutnya, maka disampaikan capaian sembilan IKP Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut.

Tabel 29. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%
Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati					
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)				130
	a. 10 unit KK meningkat	KK	10	11	110
	b. 40 unit KK meningkat	KK	40	119	297,5 (150)
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	20	12	60
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013				125
	a. 15 satwa meningkat	%	2	26,89	1.344 (150)
	b. 10 satwa prakondisi	%	100	100	100
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	Unit	13	10	76,92
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	1	14,29
Rata-rata capaian IKP Sasaran 1					81,24
Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati					
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	Rp. Trilyun	5	5,31	106,15
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	210.136	84,05
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	3.500.000	4.038.070	115,37
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	Unit	25	38	152 (150)
Rata-rata capaian IKP Sasaran 2					113,89
Total rata-rata IKP					97,57

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sembilan IKP Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebesar 97,57%. Capaian ini terdiri atas 2 sasaran, di mana rata-rata capaian IKP sasaran 1 adalah sebesar 81,24%, sedangkan rata-rata capaian IKP sasaran 2 adalah sebesar 113,89%. Pada sasaran 1, terdapat beberapa indikator yang capaian kerjanya masih rendah diantaranya adalah Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas, pada tahun 2015 terealisasi 1 paket data di wilayah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sulawesi, sehingga capaian kinerjanya adalah 14,29% dibandingkan target 7 paket data. Adapun penjelasan atas capaian IKP Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- 1) Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati
 - a) Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian atas indikator ini telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya.

- b) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE diamanahkan untuk mengelola seluruh kawasan konservasi secara efisien dan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pembangunan KPHK merupakan langkah strategis untuk membentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak. KPHK adalah kawasan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan konservasi untuk melindungi satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya secara efisien dan lestari.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai KPHK Non Taman Nasional sebanyak 12 Unit yaitu sebagai berikut :

- (1) KPHK Rawa Singkil di Aceh;
- (2) KPHK Arau Hilir di Sumatera Barat;
- (3) KPHK Kerumutan di Riau;
- (4) KPHK Dangku Bentayan di Sumatera Selatan;
- (5) KPHK Guntur Papandayan di Jawa Barat;
- (6) KPHK Tambora di Nusa Tenggara Barat;
- (7) KPHK Ruteng di Nusa Tenggara Timur;
- (8) KPHK Gunung Melintang di Kalimantan Barat;
- (9) KPHK Towuti di Sulawesi Selatan;
- (10) KPHK Morowali di Sulawesi Tengah;
- (11) KPHK Nantu di Gorontalo, dan
- (12) KPHK Jayawijaya di Papua.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 (20 unit), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 60%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (100 unit), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 12%.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan rapat koordinasi rancang bangun KPHK pada bulan Juli 2015, pada rapat tersebut Direktur Jenderal KSDAE merubah target tersebut menjadi 40 unit KPHK pada tahun 2015 dan 60 unit KPHK pada tahun 2016, akan tetapi perubahan target tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE sehingga pada tahun 2015 masih menggunakan target 20 unit.

Tahun 2015 difokuskan untuk penyusunan NSPK Draft Petunjuk Teknis Operasional KPHK, pembangunan basis data, serta penyiapan SDM dan sarpras pada 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

unit KPHK non TN. Operasionalisasi KPHK non TN lainnya menunggu penetapan oleh Menteri LHK. Terdapat 42 unit KPHK yang telah diusulkan kepada Menteri LHK melalui Nota Dinas Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 409/KSDAE-PIKA/ 2015 tanggal 30 November 2015 perihal Penyampaian 23 Rancang Bangun KPHK Non Taman Nasional dan Nota Dinas Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 423/KSDAE-PIKA/2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Penyampaian 19 Rancang Bangun KPHK Non TN.

Dalam rangka percepatan pembentukan dan operasionalisasi KPHK Non TN, Direktur Jenderal KSDAE telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh Kepala Balai Besar/Besar KSDAE untuk mempedomani Surat edaran Rancang Bangun KPHK Non TN dan segera menyampaikan Rancang Bangun KPHK yang selanjutnya dapat ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja yaitu unit KPHK yang telah terbentuk belum sepenuhnya beroperasi karena beberapa kendala diantaranya kelembagaan yang belum sepenuhnya mandiri, SDM dan anggaran yang terbatas.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi.

- c) Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian atas indikator ini telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya.

- d) Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit (target 5 tahun)

Ekosistem esensial terdiri atas ekosistem esensial lahan basah dan teresterial. Ekosistem Esensial Lahan Basah adalah ekosistem lahan basah yang utamanya memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis biota air atau berfungsi sebagai wilayah/jalur migrasi, atau memiliki populasi spesies burung air atau biota air penting lainnya yang tinggi. Ekosistem Esensial Terrestrial adalah suatu ekosistem daratan baik berupa hutan maupun non-hutan yang memiliki keunikan dan/atau jenis serta berperan sebagai koridor satwa liar dan habitat penting tumbuhan dan satwa liar atau memiliki populasi spesies darat penting lainnya yang tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengelolaan ekosistem esensial serta melanjutkan inisiasi yang telah dilaksanakan tahun 2010-2014, maka pada tahun 2015 - 2019 akan ditetapkan kembali lokasi-lokasi kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial. Adapun langkah-langkah dan tahapan kegiatan penetapan lokasi kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial antara lain adalah Identifikasi, Inventarisasi dan Klasifikasi, Delineasi, Pengusulan, Konsultasi Publik, dan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial. Selain itu, kawasan ekosistem esensial dapat dibentuk khusus untuk melindungi spesies tumbuhan tertentu atau yang disebut sebagai Taman Keanekaragaman Hayati serta melindungi jalur lalu lintas satwa atau disebut sebagai Koridor Kawasan Konservasi.

Adapun Taman Keanekaragaman Hayati merupakan suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Koridor Kawasan Konservasi (wildlife corridor) merupakan jejaring/jalur antar kawasan konservasi atau habitat keanekaragaman hayati, yang menghubungkan dua atau lebih kawasan konservasi. Koridor ini sangat penting bagi keberlanjutan proses – proses ekologi termasuk diantaranya mendukung pergerakan atau lalu lintas satwa liar serta dapat menentukan keberlanjutan populasi tersebut.

Ekosistem esensial penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati didalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem esensial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari. Untuk itu, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial perlu memfasilitasi pembentukan kelembagaan kawasan ekosistem esensial sebagai upaya untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan kawasan ekosistem esensial.

Pada kurun waktu 2015–2019 akan dilaksanakan fasilitasi pembentukan kawasan ekosistem esensial sejumlah 48 KEE, dengan rincian 6 KEE dengan karakteristik ekosistem karst, 6 KEE mangrove, 6 KEE koridor kawasan konservasi, 30 KEE taman kehati.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kawasan ekosistem esensial yang terbentuk kelembagaannya sebanyak 10 kawasan ekosistem esensial (KEE), yaitu sebagai berikut:

- (1) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat;
- (2) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat;
- (3) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (4) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang;
- (5) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang;
- (6) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan;
- (7) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat;
- (8) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
- (9) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bangka Belitung;
- (10) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kota Banjar Baru.

Sedangkan 3 KEE yang sedang diproses penetapan kelembagaannya dan terkendala penyelesaiannya karena kendala pelaksanaan Pilkada serentak (menghambat penyelesaian surat-surat di tingkat Pemda) maupun kendala-kendala lainnya adalah :

- (1) KEE Karst Sangkulirang Mangkalihat, Kaltim;
- (2) KEE Teluk Pangpang, Jatim;
- (3) KEE Jaring Halus, Sumut.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 (13 unit), maka capaian kinerjanya 76,92%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (48 unit), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 20,83%.

Pada tahun 2015 ditargetkan terbentuk kelembagaan 13 Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang terdiri atas 10 KEE Taman Keanekaragaman Hayati, 1 KEE Karst, dan 2 KEE Mangrove. Adapun KEE koridor hidupan liar belum ditargetkan untuk terbentuk di tahun 2015. Pencapaian target kinerja pembentukan kawasan ekosistem esensial dilaksanakan dengan metode inventarisasi ke lokasi target, pertemuan-pertemuan dan diskusi dengan stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, kalangan akademisi/pakar, LSM, dan pihak Swasta) yang berada di sekitar lokasi kawasan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ekosistem esensial serta penyusunan draft kelembagaan pengelolaan KEE di tingkat Pemda. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Lokakarya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati, Lokakarya Pengembangan Basis Data KEE, Talkshow dan Lokakarya Pengelolaan Ekosistem Karst. Khusus untuk KEE koridor hidupan liar, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyiapan dan dukungan untuk pembentukan KEE di Tahun 2016.

Kegiatan – kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi taman keanekaragaman hayati di 10 lokasi guna koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Lokakarya Taman Keanekaragaman Hayati dengan hasil adanya deklarasi dari Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan Taman Keanekaragaman Hayati.
3. Tersedianya dana alokasi khusus pelaksanaan taman keanekaragaman hayati di Kabupaten/Kota di daerah.
4. Dukungan pihak swasta untuk mendukung taman keanekaragaman hayati terkait pelaksanaan PROPER.
5. Identifikasi dan inventarisasi lokasi potensial sebagai target kegiatan KEE koridor/HCV melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, Eselon I dan II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan perusahaan pemegang konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Pertambangan, Perkebunan Sawit, Perguruan Tinggi, Konsultan pelaksana penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan LSM/NGO yang bergerak di bidang konservasi. Adapun keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah data tentang koridor dan areal bernilai konservasi tinggi/ HCV yang tersebar di areal konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Pertambangan, Perkebunan Sawit maupun APL lainnya.
6. Identifikasi dan inventarisasi lokasi potensial sebagai target kegiatan KEE koridor/HCV juga dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) hal ini dilaksanakan bagi calon lokasi KEE koridor/HCV yang telah diinisiasi oleh LSM/NGO dalam hal identifikasi dan inventarisasinya. Kegiatan ini dilaksanakan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (Koridor/ HCV habitat Komodo dan Kakatua Jambul Kuning) dan Samarinda, Kalimantan Timur (Koridor/ HCV Orangutan dan Badak sumatera). FGD ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah setempat, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Perguruan Tinggi, Perwakilan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HA/HT, perkebunan sawit, Masyarakat adat, LSM/NGO yang bergerak di bidang konservasi. Adapun keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah data tentang Koridor/ HCV habitat Komodo dan Kakatua Jambul Kuning, Koridor/ HCV Orangutan dan Badak sumatera serta adanya dukungan Pemda, dunia usaha, LSM/NGO, masyarakat guna pelestarian habitat satwa tersebut diatas melalui pembentukan KEE habitat satwa tersebut dalam bentuk KEE koridor/ HCV.
7. Fasilitasi Penetapan Koridor Kehidupan Liar dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Untuk mencapai IKK Direktorat BPEE tahun 2015-2019, Direktorat BPEE telah memfasilitasi pemerintah daerah berupa pertemuan teknis dan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait di Medan dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Rencana penetapan Koridor Kehidupan Liar di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu koridor yang menghubungkan Taman Nasional Betung Kerihun (TN BK) dan Taman

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Nasional Danau Sentarum (TN DS). Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TN.BK-TN.DS. Direktorat BPEE mengusulkan penambahan klausul tentang "Ekosistem Esensial" pada draft tersebut.

8. Penyusunan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) Koridor Hidupan Liar

Berdasarkan PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), penetapan koridor hidupan liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar (satwa) serta memudahkan satwa bergerak dari satu areal ke areal lainnya. Untuk membangun dan mengelola koridor kehidupan liar (satwa) diperlukan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) yang dituangkan dalam Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Kehidupan Liar. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi stakeholders terkait untuk membangun dan mengelola koridor kehidupan liar. Untuk menyusun Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Kehidupan Liar telah dilaksanakan pertemuan teknis dan pertemuan koordinasi dengan pakar dan berbagai satakeholders terkait. Ruang lingkup NSPK meliputi : pendahuluan (latar belakang, defenisi koridor, fungsi koridor, jenis/tipe koridor, derah penyanggah, kriteria penetapan koridor dan dasar hukum), penetapan dan pengelolaan, desain pembangunan koridor hidupan liar, unit pengelola, rencana aksi, pangkalan data, monitor dan evaluasi.

9. Penyusunan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) Perlindungan KEE

Berdasarkan PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), perlindungan KEE telah diamanatkan untuk dilaksanakan. Untuk memberikan landasan hukum upaya perlindungan KEE, maka disusun suatu konsep NSPK berupa draft Permen LHK tentang Perlindungan KEE. Draft NSPK ini dimaksudkan memberikan batasan-batasan hukum, kriteria KEE, langkah-langkah pembentukan kelembagaan pengelola dan penetapan KEE, pengembangan pemanfaatan KEE dan pelaksanaan monev pengelolaan KEE. Draft final telah diselesaikan pada tahun 2015 dan dalam proses pengajuan ke Menteri LHK melalui Setditjen KSDAE.

10. Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan KEE

Kegiatan ini dilaksanakan di Bali dan dimaksudkan untuk menghimpun para pengelola KEE untuk menyatukan pandangan mengenai penyusunan Rencana Aksi Perlindungan KEE dan tata cara penyelesaiannya. Hal ini penting sebagai arahan untuk penyelesaian Renca Aksi yang akan menjadi acuan bagi pengelola KEE untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan KEE serta penganggarannya serta kerangka waktu dan mitra kerja samanya. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh kesatuan konsep penyusunan Rencana Aksi serta arahan penyelesaiannya. Diharapkan kendala-kendala internal yang mungkin terjadi di tingkat Pemda dapat direduksi setelah terlaksananya kegiatan ini.

Pada periode 2010 – 2014 telah diamanatkan untuk membentuk kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial dengan capaian terbentuknya Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial di 10 lokasi sesuai Inpres 3/2010 (jumlah lokasi ditambah menjadi 17 lokasi untuk mencakup beberapa kawasan tambahan yang dinilai krusial untuk dilindungi). Capaian ini untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian pencapaian di tahun 2010 sebanyak 3 lokasi, tahun 2011 di 4 lokasi, tahun 2012 di 3 lokasi, tahun 2013 di 7 lokasi, dan tahun 2014 merupakan fase monitoring dan evaluasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berkaca pada data di atas, maka pencapaian target kinerja di tahun 2015 meningkat karena pada tahun pertama saja telah terbentuk kawasan ekosistem esensial di 13 lokasi dari 48 lokasi yang telah diamanatkan untuk periode 2015-2019. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja tahunan yang signifikan bila dibandingkan antara periode 2010-2014 dan periode 2015-2019.

Penyebab meningkatnya hal ini adalah karena secara konsep, perlindungan dan pengelolaan KEE sudah cukup matang karena telah disusun sejak tahun 2013 dan telah dibahas dengan para pihak (draft Permen LHK tentang Perlindungan KEE telah tersedia dan dalam proses penyelesaian ke Menteri LHK melalui Setditjen KSDAE). Selain itu, beberapa lokasi KEE merupakan lokasi KEE yang telah dimulai penggarapannya sejak 2010-2014 sehingga prosesnya tidak dimulai dari nol.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian target kinerja di tahun 2015, antara lain :

1. Konsep ekosistem esensial yang sudah matang belum menjadi NSPK definitif (Permen LHK) sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Frekuensi sosialisasi dan promosi tentang konsep perlindungan KEE belum cukup memadai untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap tata cara penetapan dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. Sebagian UPT Ditjen KSDAE, khususnya Balai/Balai Besar KSDA, belum menganggarkan kegiatan pengelolaan ekosistem esensial yang bersinggungan dengan wilayah kerjanya, sehingga upaya perlindungan KEE belum optimal;
4. Terbatasnya anggaran yang tersedia di Pemerintah Daerah terkait untuk pengelolaan ekosistem esensial.

Selanjutnya, beberapa solusi dan alternatif penyelesaian permasalahan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi, workshop, dan lokakarya secara intensif dengan mengundang stakeholder terkait (pemerintah daerah, UPT Ditjen KSDAE, kalangan akademisi/pakar, LSM, dan Swasta) untuk mensosialisasi dan mengkaji konsep penetapan dan pengelolaan ekosistem esensial;
2. Menyelesaikan draft Permen LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial;
3. Menyampaikan surat edaran kepada UPT Ditjen KSDAE terkait penganggaran kegiatan ekosistem esensial yang mendukung pencapaian IKK Ditjen KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Mensosialisasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi bagi Pemda untuk pengelolaan ekosistem esensial.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan pemahaman konsep perlindungan KEE di tingkat Pemda dan stakeholder lainnya.
2. Tersedianya data dan informasi yang lebih mendalam tentang lokasi-lokasi ekosistem penting dan ekosistem esensial yang mencakup 48 lokasi target Renstra 2015-2019.
3. Meningkatnya peluang tersedianya penganggaran perlindungan KEE, baik di tingkat Pemda maupun dari sumber-sumber pendanaan lain yang sah.



Gambar 18.
Peninjauan Lokasi Areal
Bernilai Konservasi
Tinggi pada Wilayah
Kerja Mitra Swasta

Gambar 19.
Focus Group Discussion
Pengelolaan Ekosistem
Esensial di Kabupaten
Manggarai Barat



- e) Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) (target 5 tahun)

Berdasarkan UU Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terdapat langkah-langkah operasional dalam pengelolaan sumber daya genetik antara lain meliputi kegiatan : 1) inventarisasi dan identifikasi sumber daya genetik; 2) melakukan pencadangan sumberdaya alam hayati; 3) membuat kebijakan Nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati dari pencurian dan perlunya pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan inventarisasi data dan informasi sebaran keanekaragaman hayati baik spesies maupun genetik, yang bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia.

Pada periode Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 telah ditargetkan untuk tersedianya paket data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi. Target setiap tahunnya adalah sebanyak 7 paket data. Pada tahun 2015 telah terlaksana 1 paket data di 6 lokasi melalui kegiatan identifikasi potensi tumbuhan obat, yaitu :

1. Suaka Margasatwa Nantu, BKSDA Sulut;
2. Desa Labuaja, Resort Camba, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;
3. Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Taman Nasional Bantimurung;
4. TWA Batu Putih, BKSDA Sulut;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5. Bolonsio, SPTN Wilayah III, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
6. Toraut, SPTN Wilayah III, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja tahun 2015 adalah sebesar 14,29%. Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target 5 tahun (7 paket data) yaitu 14,29%.

Pemetaan tumbuhan obat yang berpotensi dilindungi melalui skema indikasi geografis :

1. Identifikasi asal usul, endemisitas dan keunggulan komparatif jenis tumbuhan obat berdasarkan daftar tumbuhan obat di Sulawesi.
2. Penetapan prioritas tumbuhan obat yang bersifat endemik dan/atau berpotensi untuk dilindungi melalui skema indikasi geografis.

Berdasarkan hasil identifikasi di 6 lokasi ditemukan ± 48 jenis tumbuhan di lokasi Bolonsio dan Toraut TN Bogani Nani Wartabone, 92 jenis tumbuhan di SM Nantu, 34 jenis tumbuhan obat di Bantimurung yang berpotensi sebagai tumbuhan obat. Adapun jenis-jenis tumbuhan berkhasiat obat yang ditemukan diantaranya: Amok (*Cananga odorata*), Tolutu (*Pterocymbium tinktorium*), Keng (*Bischofia javanica*), Bitau (*Calophyllum soulattri*), Dalik (*Harpulia cupanoides*), Togop (*Artocarpus elasticus*), Pala hutan (*Myristica* sp), Onunang (*Cordia dichotoma*), langsung hutan (*Lansium domesticum*), Deangow (*Elateriospermum tapos*), Lingkobung (*Macaranga gigantea*), Manggis hutan (*Garcinia* sp), Kayu Lawang, Buto butong (*Dyospiros buxifolia*), Linggua (*Pterocarpus indicus*), Ongkolam (*Eucalyptus deglupta*), Kayu mas, Tagalolo (*Ficus septica*), Atul (*Mallotus moluccana*), Binuang (*Octomeles sumatrana*), Kayu kambing (*Garuga floribunda*), Belimbing botol (*Averhoa bilimbi*), Torosik (*Drypretes* sp), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), Kayu sirih (*Piper aduncum*), Akar kuning (*Arcangelisia flava*), Jahe hutan dan Aren (*Arenga pinnata*).

Berikut beberapa kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan di beberapa daerah sebagai upaya untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sumber daya genetik:

1. Workshop Fasilitasi Pengelolaan SDG Ekoregion
Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya dan dihadiri peserta dari Perguruan Tinggi, Balai-balai penelitian, serta instansi/unit kerja terkait yang dimaksudkan untuk mendiskusikan dan identifikasi prioritas-prioritas penelitian terkait sumber daya genetik dan biologi molekuler; mendiskusikan kebutuhan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik terutama akses, kepemilikan dan kelembagaan pengaturan SDG Indonesia dan mendiskusikan etika penelitian dan manfaat yang didapat untuk Indonesia atas hasil penelitian. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi senjang pengaturan pengelolaan SDG terkait dengan kebutuhan penelitian dengan konsep kebijakan yang sudah ada (draft revisi UU 5/90 dan RRU PSDG) dan Rumusan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik di tingkat pusat dan daerah terutama untuk kegiatan penelitian.
2. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik
Untuk mencapai IKK Direktorat KKH tahun 2015-2019, Dit. KKH telah melakukan beberapa kegiatan berupa pertemuan teknis dan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian target kinerja di tahun 2015, antara lain :

1. Kurangnya SDM (ahli biologi/etnobotani, geospasial dan taksonomi) dalam kegiatan identifikasi jenis tanaman obat.
2. Kerusakan habitat akibat adanya alih fungsi hutan baik pembukaan areal untuk tujuan pengembangan perkebunan, pertanian dan pemukiman maupun fenomena alam berupa kebakaran hutan secara langsung mengancam keberadaan habitat alami dari plasma nutfah tanaman obat endemik.
3. Kurangnya perhatian dan pengetahuan terhadap upaya pelestarian tanaman obat terutama untuk jenis-jenis yang tergolong langka.
4. Keterbatasan pendanaan dan waktu pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi obat pada 6 lokasi yang meliputi 3 UPT terpilih yaitu BKSDA Sulawesi Utara, BTN Bogani Nani Wartabone dan BTN Bantimurung Bulusaraung.

Selanjutnya, beberapa solusi dan alternatif penyelesaian permasalahan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi, workshop, dan pertemuan teknis secara intensif dengan mengundang stakeholder terkait (pemerintah daerah, UPT Ditjen KSDAE, kalangan akademisi/pakar, LSM, dan Swasta) untuk mensosialisasi dan mengkaji penetapan prioritas tanaman obat dan penyusunan peta data dan informasi pendukung terhadap tanaman obat yang dipetakan;
2. Melakukan upaya konservasi/pelestarian sumberdaya genetik khususnya tumbuhan yang memiliki potensi sebagai bahan baku obat;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan kehati, serta melestarikan pengetahuan tradisional untuk mengolah tumbuhan obat.

Hasil Identifikasi tumbuhan obat di wilayah Sulawesi akan masuk ke dalam sistem database sumber daya genetik pada portal balai kliring akses dan pembagian keuntungan. Portal balai kliring akses dan pembagian keuntungan yang merupakan mandat dari Protokol Nagoya. Database tumbuhan obat sebagai salah satu database sumberdaya genetik memiliki informasi penting bagi pengguna (user) dalam melakukan pemanfaatan tumbuhan obat, misalnya seperti kandungan dan potensi obat yang akan dikembangkan dalam usaha farmasi. Dikembangkannya sistem basis data dan informasi keanekaragaman hayati, khususnya spesies dan genetik yang valid, dapat menjadi bahan masukan penyusunan kebijakan pengelolaan kehati serta menyusun program yang tepat sasaran.



Gambar 20. Kegiatan Identifikasi Potensi Tanaman Obat di BTN Bogani Nani Wartabone

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2) Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

- a) Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2015. Capaian atas indikator ini telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya.

- b) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke kawasan konservasi dengan dengan jumlah target tahun 2015 sebanyak 250.000 orang. Sampai akhir tahun 2015 jumlah wistawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 210.136 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 84,05%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (1,5 juta orang), maka capaian kerjanya adalah sebesar 14,01%.

Data kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2011-2015 disampaikan pada Gambar 21.



Gambar 21. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015

Pencapaian kinerja terkait data kunjungan wisatawan mancanegara diperoleh dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa yang ada di Indonesia. Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah BBKSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, BBKSDA Jawa Timur (TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean).

Dalam upaya mencapai indikator kegiatan ini, Ditjen KSDAE melalui Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) telah melaksanakan kegiatan pendukung yaitu 1) Pemberian Informasi dan Promosi Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam; 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan 3) Pembinaan dan Koordinasi. Tiga komponen tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pembuatan Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam (Bahasa Inggris); berupa penggandaan peta wisata Taman Wisata Alam sebanyak 2.800 Eks, penggandaan peta wisata Taman Nasional sebanyak 3.000 Eks dan pembuatan Bokklet sebanyak 3.960 Eks.
2. Pembuatan Buku Destinasi Wisata Eksotik di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (Bahasa Inggris) sebanyak 500 buku.
3. Pameran Jambore Konservasi Alam Nasional 2015 yang dilaksanakan di Taman Nasional Ujung Kulon dengan mengundang para duta besar yang telah melakukan kerjasama terkait jasa lingkungan pada tanggal 8-10 Agustus 2015.
4. Pameran Promosi Konservasi Alam di Luar Jakarta yaitu berpartisipasi dalam Pameran "Green & Conservation Expo (GREENTEX 2015) di Bandung pada tanggal 20 s.d. 23 Agustus 2015.
5. Audit Surveliance ISO 9001 : 2008
6. Mengikuti Pelatihan dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia PJLHK.
7. Sinkronisasi/Rapat/Pembinaan dan Lain-lain Bidang PPKA.
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Wisata Alam.
9. Dukungan Event Jambore Konservasi Alam Nasional 2015.
10. Dukungan Tomini Sail Event 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini terdapat beberapa faktor-faktor penyebab target tidak bisa tercapai yaitu karena adanya bencana alam seperti erupsi gunung merapi dan kabut asap di beberapa daerah di Indonesia, sehingga mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan yaitu 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (back to nature); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; 3). Lebih gencarnya upaya promosi seperti melalui media seperti media cetak maupun elektronik; serta 4). Adanya kebijakan penambahan jumlah Negara yang dikenakan bebas visa kunjungan ke Indonesia.

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat permasalahan, diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di lapangan (UPT) masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK dan lain sebagainya.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti terutama dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, terdapat alternatif solusi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, misalnya dengan Menteri Pariwisata dengan ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 dan NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015 ;

4. Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Korea Forest Service yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan ecotourism di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project "Community based ecotourism" di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja, yaitu kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cendera mata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam.

Gambar 22. Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Taman Nasional Rinjani

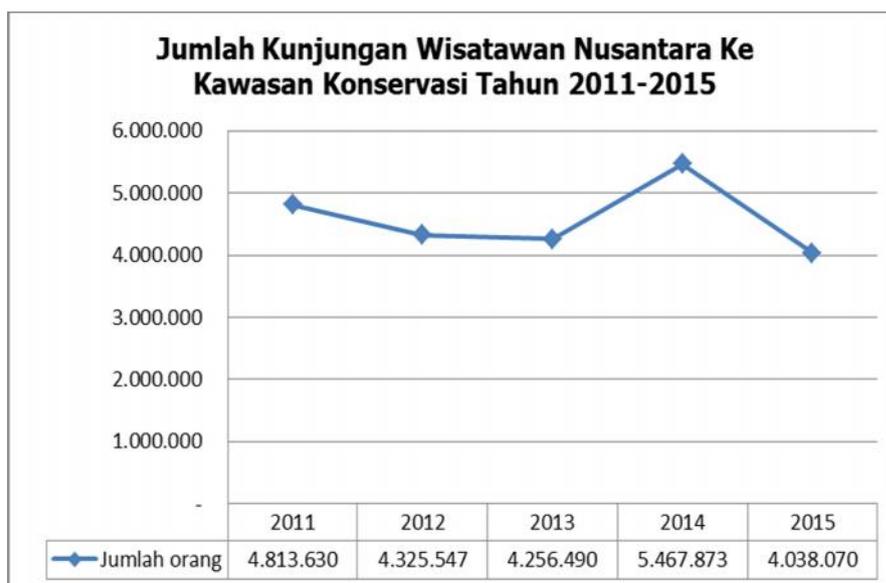


Gambar 23. Aktivitas pengunjung memandikan Gajah di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuseur

- c) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara (target 5 tahun)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke kawasan konservasi dengan dengan jumlah target tahun 2015 sebanyak 3.500.000 orang. Sampai akhir tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung sebanyak 4.038.070 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 115,37%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 5 tahun (20 juta orang), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 20,19%.

Data kunjungan wisatawan nusantara selama tahun 2011-2015 disampaikan pada Gambar 24.



Gambar 24. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2011-2015

Pencapaian kinerja terkait data kunjungan wisatawan nusantara diperoleh dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa yang ada di Indonesia. Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah BBKSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Putting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango dan BBKSDA Jawa Timur (TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Gunung Baung, SM Dt. Yang, SM Pulau Bawean).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan kegiatan melalui 4 komponen kegiatan yaitu :

1. Informasi dan Promosi Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam;
2. Pembinaan dan Koordinasi;
3. Bimbingan Teknis;
4. Monitoring dan Evaluasi.

Empat komponen tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

1. Materi Promosi dan pemasaran Konservasi Alam.
2. Promosi Konservasi Alam Melalui Media Massa.
3. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta.
4. Pameran Konservasi Alam Mobile.
5. Rapat-rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
6. Fasilitasi Pembentukan Forum Jasa Wisata Alam.
7. Penyelesaian Program dengan Satuan Tugas di Kementerian LHK dalam rangka Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan TWA Grojogan Sewu menjadi Tahura.
8. Identifikasi Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Hutan Konservasi.
9. Pengelolaan Website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK.
10. Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
11. Monev Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
12. Monitoring Peningkatan Kapasitas SDM Bidang PJLHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari permasalahan, diantaranya adalah

- 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam dilapangan (UPT) masih

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK dan lain sebagainya; dan 2). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti terutama dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain); 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015 ; 4). Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Korea Forest Service yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan ecotourism di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project "Community based ecotourism" di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan yang telah dilakukan seperti adanya 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (back to nature); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; serta 3). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJLHK seperti melalui media.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja yaitu kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cendera mata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Pencapaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara telah memberikan kontribusi PNBP kepada Negara sebesar Rp. 117.520.539.716,-.



Gambar 25. Wisatawan Nusantara di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- d) Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)

Indikator Kinerja Program ini memuat 3 indikator yaitu :

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013;
2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit;
3. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit.

Sampai dengan tahun 2015, capaian indikator-indikator tersebut disampaikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Capaian Indikator Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebanyak 130 Unit (Usaha Pariwisata Alam Sebanyak 100 Unit, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sebanyak 25 Unit, Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Geothermal Sebanyak 5 Unit)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2015	Realisasi	%
1	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	Unit	20	28	140
2	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	10	200
3	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	-	-	-
	Rata-rata				150 (170)

Penjelasan atas capaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2015 dengan jumlah target tahun 2015 sebanyak 20 unit. Sampai akhir tahun 2015 jumlah IUPSWA dan IUPJWA sebanyak 28 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 140,00%. Terhadap target 5 tahun (100 unit), capaiannya adalah sebesar 28%.

Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi, sampai dengan Desember 2015 telah dikeluarkan izin sebanyak 28 unit terdiri dari IUPSWA sebanyak 6 unit dan IUPJWA sebanyak 22 unit.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

IUPSWA 6 (enam) unit yaitu sebagai berikut :

- TN. Kerinci Seblat (1 unit), yaitu PT. Linggau Bisa/Pemda Lubuk Linggau;
- TN. Ujung Kulon (1 unit) yaitu PT Wana Wisata;
- TWA. Tanjung Tumpa (2 unit), yaitu PT. Naga Mountain Beach dan PT. Mitra Alam;
- TWA. Pulau Sangalaki (1 unit), yaitu PT. Sangalaki Manta Paradise;
- TWA. Muka Kuning (1 unit), yaitu PT. Lise Batam |rimba Lestari.

IUPJWA 22 (dua puluh dua) unit yaitu sebagai berikut :

- TN. Gunung Ciremai (10 unit);
- TN. Alas Purwo (5 unit);
- TN. Wakatobi (1 unit);
- TN. Kelimutu (1 unit);
- TN. Baluran; (1 unit);
- TWA. Gunung Papandayan (4 unit).

Pengusahaan pariwisata alam diatur dalam Permenhut Nomor : P.48/Menhut-II /2010 dan Permenhut Nomor : P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA). Pemberian izin terkait kegiatan pengusahaan wisata alam terdiri dari Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

Kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBPN, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cendera mata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa, yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara.

2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2015 dengan jumlah target tahun 2015 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2015 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak 10 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 200%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%. Jika dibandingkan dengan target 5 tahun (25 unit), maka capaian kinerjanya adalah sebesar 40%.

Pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 10 Izin pemanfaatan yaitu IUPA sebanyak 1 unit dan IPA sebanyak 9 unit. IUPA sebanyak 1 unit yaitu : PDAM Tirta Sakti di Kabupaten Kerinci, Taman Nasional Kerinci Seblat. Sedangkan IPA sebanyak 9 unit yaitu di 1). Taman Nasional Dunung Gede Pangrango 2 unit; 2). Taman Nasional Halimun Salak 1 unit; 3). Taman Nasional Laiwangi Wanggameti sebanyak 1 unit; 4). Taman Wisata Alam

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sidrap, KSDA Sulawesi Selatan; 5); Taman Nasional Krimun Jawa 1 unit; 6). Taman Wisata Alam Lejja, Sulawesi selatan 1 unit; 7). KSA Gunung Permisian, Bangka Belitung 1 unit; 8). Taman Wisata Alam Danau Matano 1 unit.

Pencapaian kinerja terkait jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi adalah pemanfaatan jasa lingkungan air baik skala usaha maupun non usaha. Sampai Oktober 2015, Areal Pemanfaatan Air yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 12 lokasi terdiri dari 4 lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) dan 8 lokasi di Taman Nasional. Lokasi-lokasi tersebut yaitu TWA Gunung Baung (BBKSDA Jatim), TWA Wera (BKSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (BKSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (BKSDA Kalimantan Tengah), TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat PJLHK menetapkan lokasi target untuk pencapaian IKK tahun 2015 yaitu TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bogani Nani Wartabone, TWA Bukit Tangkiling dan TWA Gunung Baung.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Direktorat PJLHK untuk memproses pemanfaatan air di kawasan konservasi terutama yang non komersial dari MoU menjadi izin. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Bimbingan teknis yang intensif terhadap setiap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air;
- Melakukan FGD dan Pertemuan Teknis untuk mencari solusi atas kendala untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis saat mengajukan izin pemanfaatan air;
- Penguatan kelembagaan kelompok pemanfaat air di UPT;
- Melakukan evaluasi dan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air di UPT.

Tetapi di beberapa UPT masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan jasa air (non komersial) yang masih belum mau mengkonversi Mou yang ada menjadi izin. Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJLHK telah intensif melakukan bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energy air. Pencapaian kinerja kegiatan ini telah memberikan kontribusi PNBP kepada Negara.



Gambar 26.
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemanfaatan Air di Taman Nasional Gunung Merapi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah diundangkan, namun ketentuan/peraturan turunannya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi (KPA) sampai saat ini belum ada, sehingga pada tahun 2015 tidak ada target izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi. Oleh karena itu pada tahun 2015 belum ada capaian kinerja.

Pada tahun 2015 dalam rangka pencapaian IKK ini baru dalam tahap penyiapan regulasi. Adapun regulasi yang telah disiapkan dalam rangka mendukung IKK adalah :

- a. Penyusunan draft final Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Tahura.
- b. Penyusunan usulan tarif iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi pada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- c. Penyusunan naskah akademik dan draft Peraturan Dirjen KSDAE tentang Restorasi Ekosistem Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Pada Areal Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- d. Telah disampaikan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat Nomor : S.452/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang isinya menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2011 tersebut telah disahkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2015 tanggal 23 Desember tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi merupakan hal yang baru untuk diterapkan di kawasan konservasi sehingga perlu dikoordinasikan dan disosialisasikan ke Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan adalah 1). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ke UPT dan para pihak yang terkait di daerah; 2) Menyusun pedoman berupa NSPK tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; 3). Melakukan survey potensi panas bumi yang berada di kawasan konservasi; dan 4). Melakukan peningkatan SDM terkait panas bumi.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja yaitu : kebutuhan manusia akan energi terutama listrik dari hari kehari makin meningkat, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan serta sumber penyedia energi nasional. Salah satu sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia adalah panas bumi. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal termasuk panas bumi yang berada di kawasan konservasi. Dari pulau-pulau besar yang ada, hanya pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas Bumi. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbarukan. Apabila potensi panas bumi yang berada di kawasan konservasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

sudah dapat dimanfaatkan sesuai aturan, maka akan berkontribusi besar dalam memasok kebutuhan energi nasional.



Gambar 27. Potensi Panas Bumi yang Berada di Kawasan Konservasi Adalah Suoh, Kab. Lampung Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

b. REALISASI ANGGARAN

1. Pagu Anggaran 2015

Kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2015 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.590.879.426.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2014 (Rp. 1.219.299.503.000,-), pagu anggaran Ditjen KSDAE mengalami peningkatan sebesar 30,47%. Gambaran selengkapnya perkembangan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2010-2015 (dalam ribuan) adalah sebagai berikut.



Gambar 28. Grafik Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2010 - 2015

Pada tahun 2015, merupakan masa transisi dari penggabungan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan struktur organisasi telah mempengaruhi penganggaran Ditjen KSDAE tahun 2015, sehingga terdapat beberapa kali perubahan pagu dan penambahan pagu hibah luar negeri dengan rincian sebagai berikut :

- a) Revisi APBN-P tanggal 29 Juli 2015 dengan pagu sebesar Rp. 1.547.011.816.000,-;
- b) Revisi Antar Program tanggal 8 September 2015 dengan tambahan pagu sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan Hibah Luar Negeri Sebesar Rp. 19.200.000.000,- dengan total pagu menjadi Rp. 1.586.211.816.000,-; dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- c) Hibah Langsung pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebesar Rp. 4.667.610.000,-, sehingga total pagu alokasi anggaran terakhir adalah Rp. 1.590.879.426.000,-.

Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 digunakan untuk membiayai satu program dan 16 kegiatan, yang terdiri dari delapan kegiatan dengan DIPA lama dan delapan kegiatan dengan DIPA baru. Alokasi anggaran per kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2015 disampaikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2015

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)
2300	Pengelolaan Kawasan Konservasi Dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	3.145.232.000
2301	Konservasi Keanekaragaman Hayati	2.644.280.000
2302	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	2.910.128.000
2303	Pengendalian Kebakaran Hutan	2.156.510.000
2304	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	2.516.224.000
2305	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	94.230.417.000
2306	Pengelolaan Taman Nasional	105.648.211.000
2308	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal PHKA	5.854.179.000
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34.847.732.000
5420	Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	27.200.000.000
5421	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	15.741.377.000
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	26.987.118.000
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	17.439.729.000
5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	18.341.243.000
5425	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	553.589.310.000
5426	Pengelolaan Taman Nasional	677.627.736.000
	JUMLAH	1.590.879.426.000

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

Kegiatan Ditjen KSDAE tersebut dilaksanakan oleh seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan Satker Pusat dan UPT di daerah selengkapnya disajikan dalam Tabel 32.

Tabel 32. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015

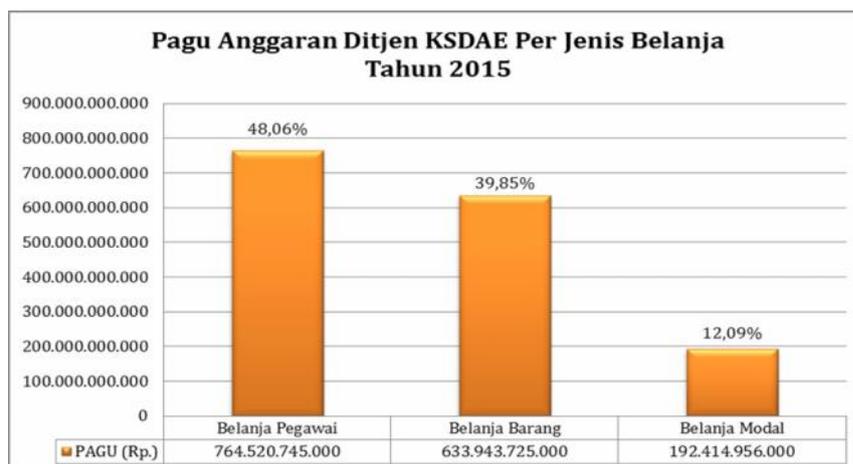
No.	Satker	Pagu (Rp.)	%
A. Satker Pusat			
DIPA LAMA			
1	Setditjen PHKA	5.854.179.000	1,21
2	Direktorat PPH	2.516.224.000	
3	Direktorat PKH	2.156.510.000	
4	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	
5	Direktorat KKH	2.644.280.000	
6	Direktorat PJLKKHL	2.910.128.000	
	Jumlah DIPA Lama	19.226.553.000	
DIPA BARU			
7	Setditjen KSDAE	34.847.732.000	8,84
8	Direktorat KK	27.200.000.000	
9	Direktorat PIKA	15.741.377.000	
10	Direktorat KKH	26.987.118.000	
11	Direktorat PJLHK	17.439.729.000	
12	Direktorat BPEE	18.341.243.000	
	Jumlah DIPA Baru	140.557.199.000	
	Jumlah A	159.783.752.000	10,04
B. Satker Daerah			
1	Balai/Balai Besar KSDA	647.819.727.000	40,72
2	Balai/Balai Besar TN	783.275.947.000	49,24
	Jumlah B	1.431.095.674.000	89,96
	JUMLAH A + B	1.590.879.426.000	100

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan adanya perubahan organisasi pada tahun 2015, maka terjadi pula perubahan pada anggaran Direktorat Pusat. Pada enam Direktorat lama terjadi proses likuidasi Satker, yang kemudian digantikan lima Direktorat baru. Dua diantara Direktorat lama bergabung pada dua Eselon I yang berbeda yaitu Direktorat PKH bergabung pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim sedangkan Direktorat PPH bergabung pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dilihat dari jenis belanja, anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam Gambar 29.



Gambar 29. Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2015

Berdasarkan komposisi pagu anggaran 2015 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat bahwa belanja pegawai mempunyai alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya, yaitu sebesar 48,06%, terbesar kedua yaitu anggaran untuk belanja barang yaitu sebesar 39,85%, dan terendah pada belanja modal sebesar 12,09%. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai paling tinggi disebabkan jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE cukup banyak yaitu 8.055 orang. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE paling banyak dari dibandingkan Eselon I lainnya. Dan jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (18.178 orang), jumlah pegawai Ditjen KSDAE sebesar 44,31%.

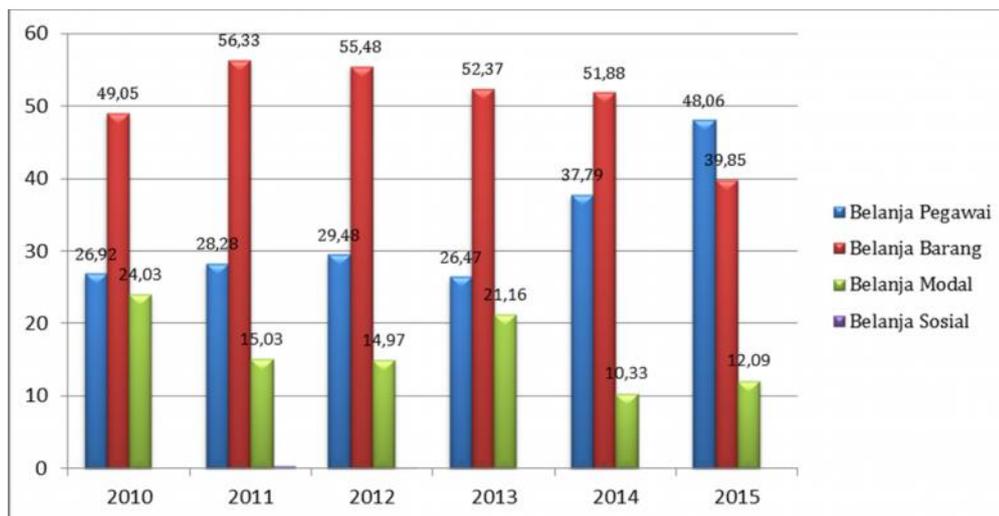
Alokasi anggaran per jenis belanja Ditjen KSDAE setiap tahunnya bervariasi, pada tahun 2014 alokasi anggaran belanja barang lebih tinggi daripada belanja pegawai. Dengan besarnya alokasi belanja barang, kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat ataupun di daerah juga lebih banyak. Komposisi pagu per jenis belanja Ditjen KSDAE dari tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2015

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Belanja Sosial (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2010	325.534.265.000	593.119.882.000	290.557.726.000	-	1.209.211.873.000
2011	362.608.213.000	722.209.561.000	192.735.307.000	4.500.000.000	1.282.053.081.000
2012	430.805.801.000	810.698.731.000	218.793.594.000	975.000.000	1.461.273.126.000
2013	444.620.275.000	879.562.737.000	355.334.833.000	-	1.679.517.845.000
2014	460.781.668.000	632.531.211.000	125.986.624.000	-	1.219.299.503.000
2015	764.520.745.000	633.943.725.000	192.414.956.000	-	1.590.879.426.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase alokasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2010-2015 disampaikan pada Gambar 30.



Gambar 30. Persentase Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja Tahun 2010-2015

Alokasi pagu per jenis belanja pada enam tahun terakhir paling tinggi adalah alokasi untuk belanja barang, akan tetapi pada tahun 2015 alokasi paling tinggi adalah pada belanja pegawai, hal ini disebabkan karena adanya penambahan alokasi Tunjangan Kinerja lingkup Ditjen KSDAE.

Pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2015 terdiri dari beberapa sumber dana, yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLL). Pagu anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan sumber dana disajikan dalam Tabel 34.

Tabel 34. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	%
1	RM	1.277.016.247.000	80,27
2	PNBP	283.538.446.000	17,82
3	HLN	25.657.123.000	1,61
4	Hibah Langsung Luar Negeri	4.667.610.000	0,29
	Jumlah	1.590.879.426.000	100

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

Pagu anggaran berdasarkan sumber dana yang tertinggi adalah bersumber dana RM sebesar 80,27%. Sedangkan yang bersumber dana PNBP adalah sebesar 17,82%. Anggaran yang bersumber dana RM lebih memudahkan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan yang bersumber dana PNBP lebih sulit karena harus menunggu Surat Edaran dari Kemenkeu tentang besaran pencairan dana PNBP yang diperkenankan.

2. Realisasi Anggaran 2015

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal PHKA tahun 2015 sebesar Rp. 1.590.879.426.000,-, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.438.933.254.093,- atau 90,45% (Sumber : SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 10 Februari 2016). Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 berdasarkan Satker disajikan dalam Tabel 35.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015

No	Satker	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A. Satker Pusat				
DIPA LAMA				
1	Setditjen PHKA	5.854.179.000	5.715.833.559	97,64
2	Direktorat PPH	2.516.224.000	2.383.943.290	94,74
3	Direktorat PKH	2.156.510.000	2.066.018.874	95,80
4	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	3.049.392.553	96,95
5	Direktorat KKH	2.644.280.000	2.540.146.219	96,06
6	Direktorat PJKKHL	2.910.128.000	2.882.975.699	99,07
	Jumlah DIPA Lama	19.226.553.000	18.638.310.194	96,94
DIPA BARU				
7	Setditjen KSDAE	34.847.732.000	31.145.535.089	89,38
8	Direktorat KK	27.200.000.000	6.939.471.483	25,51
9	Direktorat PIKA	15.741.377.000	13.087.390.289	83,14
10	Direktorat KKH	26.987.118.000	21.986.837.391	81,47
11	Direktorat PJKLHK	17.439.729.000	15.454.850.018	88,62
12	Direktorat BPEE	18.341.243.000	12.919.108.763	70,44
	Jumlah DIPA Baru	140.557.199.000	101.533.193.033	72,24
	Jumlah A	159.783.752.000	120.171.503.227	75,21
B. Satker Daerah				
1	Balai/Balai Besar KSDA	647.819.727.000	589.429.895.536	90,99
2	Balai/Balai Besar TN	783.275.947.000	729.331.855.330	93,11
	Jumlah B	1.431.095.674.000	1.318.761.750.866	92,15
	JUMLAH A + B	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

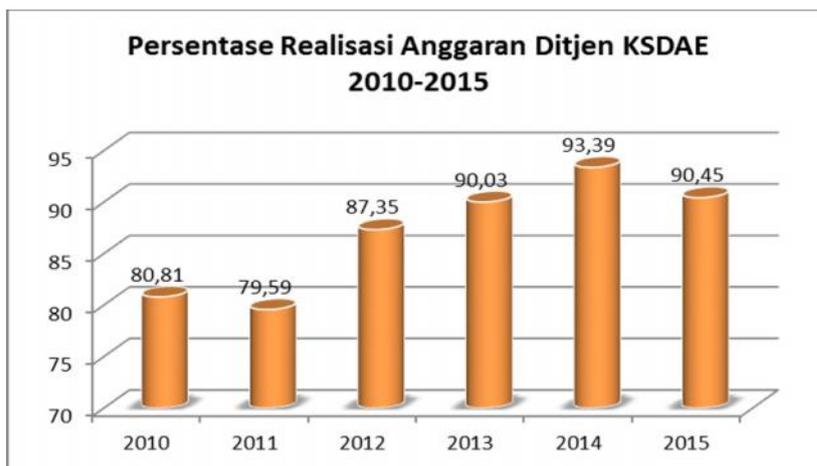
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penyerapan anggaran terbesar pada Satker pusat (DIPA baru) yaitu Setditjen KSDAE sebesar 89,38%. Sedangkan untuk Satker daerah yang mempunyai realisasi terbesar adalah Balai Besar/Balai Taman Nasional adalah sebesar 93,11%. Untuk penyerapan terkecil pada Satker pusat yaitu Direktorat KK sebesar 25,51%, hal tersebut karena pada Direktorat KK terdapat penambahan pagu hibah KfW sebesar Rp. 19,2 Milyar yang baru masuk pada bulan September 2015, sehingga sampai dengan akhir tahun belum dapat sepenuhnya terealisasi. Realisasi per Satker Lingkup Ditjen KSDAE selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Perkembangan penyerapan anggaran Ditjen KSDAE selama tahun 2010-2015 disampaikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Penyerapan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2010-2015

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2010	1.209.211.873.000	977.123.163.027	80,81
2011	1.284.702.318.000	1.022.533.057.529	79,59
2012	1.461.723.126.000	1.276.820.152.364	87,35
2013	1.679.517.845.000	1.512.033.328.897	90,03
2014	1.219.299.503.000	1.138.710.002.370	93,39
2015	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015



Gambar 31. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE 2010-2015

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010-2014 kecenderungan realisasi anggaran semakin meningkat akan tetapi pada tahun 2015 menurun. Adanya penurunan realisasi anggaran disebabkan pada tahun 2015 merupakan masa transisi perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta APBNP yang terlambat terbit yaitu pada bulan April 2015.

Selanjutnya penyerapan anggaran Ditjen KSDAE per jenis belanja disajikan pada Tabel 37.

Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	764.520.745.000	723.731.783.339	94,66
2	Belanja Barang	633.943.725.000	534.156.969.689	84,26
3	Belanja Modal	192.414.956.000	181.044.501.065	94,09
JUMLAH		1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis belanja, realisasi terbesar adalah belanja pegawai (94,66%), sedangkan yang terendah adalah realisasi belanja barang (84,26%). Besarnya realisasi belanja pegawai disebabkan karena banyaknya pegawai lingkup Ditjen KSDAE. Rendahnya belanja barang salah satunya disebabkan karena pada tahun 2015 merupakan masa transisi perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana UPT melaksanakan lebih dari satu program, yaitu selain program pada Ditjen KSDAE, juga program pada Ditjen Penegakan Hukum LKH dan program pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Penyerapan anggaran berdasarkan sumber dana disajikan dalam Tabel 38.

Tabel 38. Pagu dan Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2015

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	RM	1.277.016.247.000	1.191.638.473.613	93,31
2	PNBP	283.538.446.000	238.114.482.263	83,98
3	HLN	25.657.123.000	6.134.565.732	23,91
4	Hibah Langsung Luar Negeri	4.667.610.000	3.045.732.485	65,25
Jumlah		1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penganggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 digunakan untuk membiayai 16 kegiatan. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel 39.

Tabel 39. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Berdasarkan Kegiatan Tahun 2015

No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2300	Pengelolaan Kawasan Konservasi Dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	3.145.232.000	3.049.392.553	96,95
2	2301	Konservasi Keanekaragaman Hayati	2.644.280.000	2.540.146.219	96,06
3	2302	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	2.910.128.000	2.882.975.699	99,07
4	2303	Pengendalian Kebakaran Hutan	2.156.510.000	2.066.018.874	95,80
5	2304	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	2.516.224.000	2.383.943.290	94,74
6	2305	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	94.230.417.000	93.305.389.507	99,02
7	2306	Pengelolaan Taman Nasional	105.648.211.000	103.797.740.244	98,25
8	2308	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal PHKA	5.854.179.000	5.715.833.559	97,64
9	5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	34.847.732.000	31.145.535.089	89,38
10	5420	Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam	27.200.000.000	6.939.471.483	25,51
11	5421	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	15.741.377.000	13.087.390.289	83,14
12	5422	Konservasi Spesies dan Genetik	26.987.118.000	21.986.837.391	81,47
13	5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	17.439.729.000	15.454.850.018	88,62
14	5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	18.341.243.000	12.919.108.763	70,44
15	5425	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	553.589.310.000	496.124.506.029	89,62
16	5426	Pengelolaan Taman Nasional	677.627.736.000	625.534.115.086	92,31
		JUMLAH	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber : Setditjen KSDAE, 2015

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 16 kegiatan yang dilaksanakan Ditjen KSDAE pada tahun 2015. Delapan diantaranya merupakan kegiatan dengan DIPA lama yaitu sebelum adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kegiatan dengan kode 2300-2308), sedangkan delapan kegiatan lainnya merupakan kegiatan dengan DIPA baru/APBNP setelah adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kegiatan dengan kode 5419-5426). Kegiatan dengan DIPA lama telah terealisasi secara optimal, sedangkan kegiatan dengan DIPA baru, realisasi tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Taman Nasional (92,31%) yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai Taman Nasional. Realisasi penyerapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (25,51%), di mana penanggungjawab kegiatannya adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Rendahnya penyerapan anggaran pada Direktorat Kawasan Konservasi, disebabkan adanya hibah dari KfW dengan pagu sebesar Rp. 19,2 Milyar, di mana sampai dengan akhir bulan Desember 2015 sebenarnya telah terealisasi Rp. 9.133.200.000,- (sesuai kurs pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 15.222,-), akan tetapi realisasi hibah tersebut masih dalam proses yaitu sampai pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melakukan verifikasi Notice of Disbursement (NoD) dengan Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana (SP-SPD) pada tanggal 17 Desember 2015. Di mana proses akhirnya semestinya sampai pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) menyampaikan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada Bank Indonesia

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

(BI) dan Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain hibah KfW, pada Direktorat Kawasan Konservasi juga terdapat hibah Japan International Cooperation Agency (JICA) RECA sebesar Rp. 10.751.409.812,-, akan tetapi hibah ini merupakan hibah non DIPA.

3. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015

Capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015 (berdasarkan PK Direktur Jenderal KSDAE 2015) adalah sebesar 129,61%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2015 yaitu 90,45%, maka dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2015 berjalan efisien (dengan ratio 1,43). Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dengan anggaran yang tersedia.

Dalam pencapaian kinerja dan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2015 terdapat permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan terjadinya perubahan pula pada organisasi Ditjen KSDAE, yang berpengaruh pada APNBP yang baru terbit bulan April 2015. Terkait kelembagaan Kementerian LHK (P.18/2015), dan penempatan personel baru selesai pada bulan Juli, sehingga baru mulai bekerja pada bulan Juli 2015.
2. Pencairan anggaran dengan sumber dana PNPB menunggu Surat Edaran Maksimal Pencairan (SE MP) PNPB, di mana SE PNPB 100% baru keluar pada tanggal 7 Desember 2015 melalui SE Nomor : 51/PB/2015 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNPB Dana Reboisasi dan PSDH di lingkungan KLHK tahap VI, sehingga untuk pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan waktunya sangat terbatas.
3. Pelaksanaan kegiatan di UPT terpecah pada tiga program yang harus dilaksanakan, yaitu pada Ditjen KSDAE, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
4. Pada Direktorat Kawasan Konservasi terdapat penambahan dana hibah KfW sebesar Rp. 19,2 Milyar yang baru masuk pada bulan September 2015, dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.133.200.000,-, akan tetapi masih dalam proses pengesahan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

1. Penataan pegawai terkait perubahan organisasi pada lingkup Ditjen KSDAE, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.
2. Memaksimalkan penyerapan anggaran pada sumber dana Rupiah Murni karena pencairan anggarannya tidak dibatasi.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran, khususnya pada program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem agar sinergis dengan program pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.
4. Pada hibah KfW Direktorat Kawasan Konservasi agar bisa segera didorong penyelesaiannya sehingga realisasi anggaran sebesar Rp. 9.133.200.000,- bisa diterbitkan SP3nya.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2015, merupakan tahun transisi dari perubahan organisasi, yaitu penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta transisi dari periode Renstra 2010-2014 menuju ke periode Renstra 2015-2019, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan evaluasi lebih lanjut atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, sehingga ke depan lebih dapat memaksimalkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang telah direncanakan.

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2015 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2015. Dalam laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.

Capaian kinerja berdasarkan IKP yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebesar 129,61% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara			133,84
		a. Nilai Ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	5 T	5,31 T	106,15
		b. Nilai PNBP dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	10 M	14,54 M	145,37
		c. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	38,3 M	121,83 M	317,81 (150)
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat			130
		a. 10 KK meningkat	10 unit KK	11 unit KK	110
		b. 40 KK prakondisi	40 unit KK	119 unit KK	297,5 (150)
		Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat			125
		a. 15 satwa meningkat	2%	26,89%	1.344 (150)
		b. 10 satwa prakondisi	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program					129,61

Rata-rata capaian sembilan IKP Ditjen KSDAE tahun 2015 adalah sebesar 97,57%, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%
Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati					
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)				130
	a. 10 unit KK meningkat	KK	10	11	110
	b. 40 unit KK meningkat	KK	40	119	297,5 (150)

BAB IV PENUTUP

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	Unit	20	12	60
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013				125
	a. 15 satwa meningkat	%	2	26,89	1.344 (150)
	b. 10 satwa prakondisi	%	100	100	100
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	Unit	13	10	76,92
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	Paket Data	7	1	14,29
Rata-rata capaian IKP Sasaran 1					81,24
Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati					
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	Rp. Trilyun	5	5,31	106,15
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	210.136	84,05
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	3.500.000	4.038.070	115,37
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	Unit	25	38	152 (150)
Rata-rata capaian IKP Sasaran 2					113,89
Total rata-rata IKP					97,57

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2015, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pagu sebesar Rp. 1.590.879.426.000,-, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.438.933.254.093,- atau 90,45% (Sumber : SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 10 Februari 2016). Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain adanya perubahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempengaruhi terbitnya APNBP 2015 serta penataan pegawai yang baru selesai pada bulan Juli 2015, serta adanya SE MP PNBP 100% yang baru terbit pada tanggal 7 Desember 2015.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan,

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

LAMPIRAN 1.

MATRIKS TARGET KINERJA
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
	Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati					
	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	260 KK
	2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13 Unit	26 Unit	39 Unit	43 Unit	48 Unit
	5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati					
	1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	25 Unit	51 Unit	77 Unit	103 Unit	130 Unit
5420	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru					
	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
5422	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik					
	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	5. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	8 PRG	12 PRG	16 PRG	20 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi					
	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
5424	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial					
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial					
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direvisi sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies
5425	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5426	Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliabel pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5419	Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE					
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE					
	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin

LAMPIRAN 2.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DALAM RENCANA KERJA (RENJA) DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	1.070.246	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	731.200	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	3.167.060	
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	210.000	
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	23.712.860	Direktorat Kawasan Konservasi
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	599.200	
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	888.380	
	4. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	1.062.525	
	5. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	364.280	
	6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi	4.299.566	
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	7.427.193	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	1.013.150	
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	1.551.563	
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	3.302.730	
	5. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	599.920	
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	1.803.600	
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	1.380.284	
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	2.003.085	
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	257.600	
	10. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	281.200	
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	1.412.035	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	1.791.305	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.386.361	
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	879.585	
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	263.849	
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK.	-	-	
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	14.438.055	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	1.576.400	
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	613.700	
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataannya pada 6 Kawasan	-	-	
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataannya pada 6 Ekoregion	-	-	
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	1.713.088	
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	9.570.190	Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	5.253.627	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	1.948.674	
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	6.420.085	
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	1.144.624	
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	2.891.834	
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	383.108	
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	5.243.902	
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	2.388.275	
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi	29.876.318	
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	27.540.340	
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	741.384	
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	3.554.643	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	381.960	
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	-	
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	968.584	
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	12.134.432	
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.100.659	
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	51.000	
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	1.746.890	
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	6.852.590	
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	70,00 Poin	42.402.461	
	25. Jumlah kelembagaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang difasilitasi pembentukannya	13 KEE	982.693	
	26. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	466.339	
Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	3.710.699	Balai Besar/Balai Taman Nasional
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	79.040	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	1.696.085	
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	796.347	
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	6.062.004	
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	10.557.522	
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	17.644.869	
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	-	
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi	50.317.488	
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	31.449.097	
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	2.882.786	
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	350.144	
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	250.000	8.253.202	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	Orang		
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	31.447.215	
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	-	
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	-	
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	2.935.256	
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	10.351.550	
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	70,00 Poin	49.927.128	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	70,00 Poin	17.757.268	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
TOTAL BIAYA KEGIATAN			496.127.826	
LAYANAN PERKANTORAN			1.094.751.600	
TOTAL PAGU TAHUN 2015			1.590.879.426	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M. Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2015

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M. Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
a.	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.	Sumbangan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati pada Devisa dan Penerimaan Negara.
b.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati.	Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat. Populasi Spesies Terancam Punah Meningkat.

No.

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.
2. Pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Konservasi Spesies dan Genetik.
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
5. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial.
6. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
7. Pengelolaan Taman Nasional.
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Program/Kegiatan

**Anggaran (x Rp.1.000,-)
1.586.211.816**

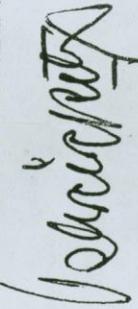
Jakarta, September 2015

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M. Sc
NIP. 19560929 1982 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 357/KSDAE-SET/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Efektivitas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk tahun 2015.
- KEDUA : Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan menyiapkan laporan yang memuat rencana aksi tindak lanjut dengan format sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, agar melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KELIMA : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar mengambil upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

A. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243024	TN	Bali Barat	Bali	73	100	82	67	68	67	88
100242012	TN	Ujung Kulon	Banten	77	100	89	78	69	67	89
100242019	TN	Gunung Merapi	Yogyakarta	65	100	72	72	55	33	89
100241007	TN	Berbak	Jambi	60	100	69	67	58	17	56
100241008	TN	Bukit Duabelas	Jambi	65	100	82	67	68	67	88
100241006	TN	Kerinci Seblat	Jambi	62	100	79	67	56	33	50
100242016	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	65	100	72	61	64	33	75
100242015	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80	100	78	72	80	83	100
100242014	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71	100	78	78	65	33	89
100242017	TN	Gunung Merbabu	Jawa Tengah	54	100	71	61	43	33	57
100242023	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75	100	79	78	73	33	89
100242020	TN	Baluran	Jawa Timur	68	100	72	72	63	67	67
100242021	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	65	100	71	67	59	67	67
100242022	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	68	100	72	78	60	33	89
100244032	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat	58	100	75	56	55	17	67
100244033	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	64	100	78	72	59	33	50
100244030	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70	100	84	72	62	33	89
100244031	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	67	100	79	61	64	33	78
100244034	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	62	100	77	56	67	67	78
100244035	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	67	100	79	61	63	50	78
100244036	TN	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	62	100	67	50	64	33	75
100244037	TN	Kutai	Kalimantan Timur	64	100	63	72	63	33	63
100241010	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	68	100	78	67	61	83	67
100241011	TN	Way Kambas	Lampung	65	100	67	67	66	33	67
100246046	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	61	100	70	62	53	44	78
100246047	TN	Manusela	Maluku	68	100	81	67	59	67	71
100243025	TN	Gunung Rinjani	NTB	65	100	71	71	53	50	75
100243028	TN	Kelimutu	NTT	66	100	62	67	62	44	100
100243029	TN	Komodo	NTT	69	100	74	57	68	67	88

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243027	TN	Laiwangi Wanggameti	NTT	58	100	65	57	57	33	63
100243026	TN	Manupeu Tanah Daru	NTT	61	100	65	67	59	33	57
100247049	TN	Lorentz	Papua	52	100	61	38	53	33	67
100247050	TN	Wasur	Papua	70	100	83	62	72	33	75
100241005	TN	Bukit Tigapuluh	Riau	58	100	83	67	45	33	50
100241004	TN	Tesso Nilo	Riau	53	100	63	56	49	33	50
100245042	TN	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72	100	78	78	67	33	88.89
100245040	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	66	100	62	62	61	44	50
100245044	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	61	100	74	67	57	33	50.00
100241003	TN	Siberut	Sumatera Barat	62	100	84	67	53	33	56
100241009	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	62	100	79	67	55	17	67
100241002	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	53	100	50	67	45	50	57
100241001	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	67	100	74	72	62	33	78

B. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN CAGAR ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100211001	CA	Pinus Jantho	Aceh	50	100	45	39	42	0	75
100213130	CA	Batukahu I	Bali	52	100	59	50	44	67	75
100211037	CA	Air Seblat Reg.89	Bengkulu	34	100	33	47	29	0	33
100211038	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	47	100	80	56	36	0	33
100211041	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu	49	100	62	50	42	33	33
100211030	CA	Pagar Gunung III	Bengkulu	28	100	13	39	24	0	33
100212107	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	49	100	53	56	41	33	57
100222052	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta	51	100	44	67	44	0	75
100211025	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	55	100	39	56	52	0	71
100212058	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	41	100	40	44	38	17	50
100212060	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	38	100	53	33	36	17	17
100212062	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	43	100	40	44	43	17	50
100212067	CA	Malabar	Jawa Barat	44	100	44	44	41	0	67
100212069	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	54	100	50	50	56	0	71
100212072	CA	Tangkuban Prahau Pelabuhan ratu	Jawa Barat	48	100	27	61	53	0	33
100212075	CA	Telaga Warna	Jawa Barat	46	100	27	50	53	0	33
100212080	CA	Bekutuk	Jawa Tengah	40	100	40	39	39	0	33

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100212085	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah	39	100	50	33	35	0	33
100212090	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	49	100	67	39	41	33	50
100212092	CA	Moga	Jawa Tengah	47	100	56	39	41	33	75
100212093	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	56	100	61	39	55	33	100
100212104	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	46	100	31	50	47	0	57
100212112	CA	Goa Nglirip	Jawa Timur	47	100	50	50	39	67	33
100212117	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	43	100	27	44	52	0	0
100212120	CA	Pancur Ijen I	Jawa Timur	54	100	53	50	52	33	75
100214148	CA	Lo Fat Fun Fie	Kalimantan Barat	50	100	33	50	56	0	67
100214160	CA	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	53	100	44	67	45	17	43
100213135	CA	Pulau Sangiang	NTB	30	100	50	22	21	0	50
100213141	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT	44	100	33	50	40	17	75
100213143	CA	Riung	NTT	35	100	20	39	36	0	33
100213144	CA	Wae Wuul	NTT	47	100	27	56	48	0	75
100217215	CA	Pegunungan Cycloops	Papua	43	100	50	33	40	0	75
100217220	CA	Tanjung Wiay	Papua	28	100	40	17	22	0	50
100211018	CA	Bukit Bungkok	Riau	32	100	38	33	24	0	50
100211019	CA	Pulau Berkeh	Riau	38	100	71	22	24	0	75
100215179	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	55	100	61	50	57	0	50
100215175	CA	Morowali	Sulawesi Tengah	46	100	50	44	41	0	80
100215176	CA	Pamona	Sulawesi Tengah	54	100	71	50	44	0	80
100211013	CA	Batang Pangean II	Sumatera Barat	51	100	44	56	48	0	80
100211015	CA	Lembah Anai	Sumatera Barat	54	100	71	39	53	0	75
100211007	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara	52	100	56	44	53	0	75
100211005	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	47	100	44	44	44	0	71

C. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUAKA MARGASATWA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100221001	SM	Rawa Singkil	Aceh	55	100	42	50	50	0	88
100222030	SM	Sermo	DI Yogyakarta	49	100	63	44	46	0	43
100222023	SM	Muara Angke	DKI Jakarta	46	100	44	61	38	33	43

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100224041	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	45	100	53	39	45	33	17
100224040	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	55	100	60	56	50	67	33
100223038	SM	Ale Aisio	NTT	44	100	33	50	42	0	50
100223034	SM	Kateri	NTT	46	100	33	50	48	0	50
100227066	SM	Sidei-Wibain	Papua Barat	13	100	20	11	6	0	0
100221008	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau	33	100	27	39	27	0	50
100221009	SM	Danau Pulau Besar/Danau Bawah	Riau	36	100	20	39	33	0	67
100221010	SM	Giam Siak Kecil	Riau	42	100	78	28	27	0	50
100225048	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	51	100	33	56	53	0	67
100225051	SM	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah	43	100	40	39	42	0	75
100225052	SM	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah	39	100	27	39	33	33	100
100221002	SM	Barumon	Sumatera Utara	54	100	53	56	48	33	67
100221003	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara	48	100	61	44	42	0	50
100221005	SM	Siranggas	Sumatera Utara	44	100	50	39	44	0	33

D. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251004	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	47	100	50	39	38	17	57
100253055	TWA	Sangeh	Bali	55	100	53	50	47	67	100
100251021	TWA	Air Rami I/II Reg.87	Bengkulu	46	100	47	61	17	17	33
100252030	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	46	100	44	50	41	50	38
100252031	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	45	100	33	33	44	50	83
100252037	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	51	100	47	44	48	50	83
100252040	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	55	100	63	61	46	67	33
100252042	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat	39	100	47	39	33	33	33
100252045	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	57	100	72	39	51	50	86
100252052	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	61	100	72	48	60	44	83
100254088	TWA	Dungan	Kalimantan Barat	45	100	33	56	43	17	43
100253064	TWA	Tanjung Tampa	NTB	40	100	59	28	37	17	33
100257123	TWA	Teluk Youtefa	Papua	34	100	56	22	27	17	50
100257118	TWA	Beriat	Papua Barat	33	100	47	39	26	0	33
100257119	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	47	100	61	44	38	50	50
100255103	TWA	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan	38	100	33	28	44	0	50

100255105	TWA	Danau Towuti	Sulawesi Selatan	49	100	53	44	53	0	50
100255098	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	42	100	33	39	39	0	100
100251013	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat	54	100	50	56	50	33	75
100251005	TWA	Deleng Lancuk	Sumatera Utara	41	100	56	39	31	17	67
100251009	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	49	100	63	50	43	17	57

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100263017	THR	Ngurah Rai	Bali	59	100	64	61	55	50	57
100265026	THR	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	52	100	44	56	41	33	63
100261003	THR	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat	17	100	28	11	10	0	33

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen			
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)
100242013	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71	86	83	73	58
100242018	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah	77	100	82	80	63
100247048	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat	64	83	82	55	50
100245043	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	69	83	84	70	54
100245041	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	46	55	60	33	42
100245045	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74	88	82	73	67
100245038	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara	66	77	83	67	54
100256115	TWAL	Pulau Pombo	Maluku	52	67	71	33	38
100256116	TWAL	Pulau Marsegu	Maluku	46	62	29	40	38
100256117	TWAL	Pulau Kasa	Maluku	44	62	29	33	40

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[Nama Kawasan]
[Tanggal dan Tahun Penilaian]

I. Profil Kawasan

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. Kondisi Ancaman

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. Faktor Dominan dan Kelemahan Pengelolaan

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0,1,2)

IV. Isu Prioritas untuk Peningkatan Efektivitas

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. Rencana Aksi

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (UPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing UPT
11.	Kepala UPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/ perguruan/ lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)

17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing UPT
D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara regular guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjung yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara regular sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, rafflesia sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NO	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di IPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan IPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektifitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPEE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH,POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat

15.	Mengatur mekanisme/epedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D. ELEMEN PROSES		
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E. ELEMEN OUTPUT		
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F. ELEMEN OUTCOME		
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

LAMPIRAN 5.

REKAPITULASI PENINGKATAN POPULASI SATWA TAHUN 2015

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan/Spesies	Metoda Pengambilan Data	
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)						
1	Harimau Sumatera	Panthera tigris sumatrae	BTN Bukit Barisan Selatan	Belimbing	45000	PT. Adhiniaga Kreanusa	28	32		14,29	28,57	Camera trap	
		Panthera tigris sumatrae	BBKSDA Riau	SM Bukit Rimbang Bukit Baling blok Wilayah Kabupaten Kampar	70000	Monitoring Balai tahun 2014		2	3			50,00	Site occupation/kamera jebak/wawancara
		Panthera tigris sumatrae	BBKSDA Riau	SM Bukit Batu	21500				3	Monitoring 2015			Site occupation/kamera jebak/wawancara
		Panthera tigris sumatrae	BTN Bukit Barisan Selatan	Belimbing	45000	PT. Adhiniaga Kreanusa	28	34	Monitoring 2015	21,43		Camera trap	
2	Gajah Sumatera	Elephas maximus sumatrensis	BTN Bukit Barisan Selatan	Way Haru - Way Canguk	26000	Survey Balai	21	22		4,76	-25,24	Dung count dan camera trap	
		Elephas maximus sumatrensis	BKSDA Aceh	Lanskap Kabupaten Aceh Tengah-Bener Meriah-Bireuen		Monitoring GPS collar tahun 2015 dan pengusuran gajah konflik tahun 2014		41	8	Monitoring bulan Mei 2015		-80,49	Pemasangan GPS Collar dan pengamatan langsung
		Elephas maximus sumatrensis	BBKSDA Riau	SM Balai Raja	18000	Monitoring tahun 2014		22	22			0,00	Tracking/driving count/wawancara
		Elephas maximus sumatrensis	BBKSDA Riau	SM Giam Siak Kecil				*)	38				Tracking/driving count/wawancara
3	Badak	Rhinoceros sondaicus	BTN Ujung Kulon	Semenanjung Ujung Kulon	38000	Laporan monitoring tahun 2013	58	63	Monitoring 2015	8,62	4,31	Video trap dengan metoda album	
		Dicerorhinus sumatrensis	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tenumbang - Way Krui - Liwa	23000	RPU-YABI (estimasi populasi 10-13 indiv)	12	12		0,00		Metode tidak langsung (jejak) dan langsung (perjumpaan)	
4	Banteng	Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi)	3647,11	Inventarisasi BBKSDA Jawa Timur tahun 2014	22	22	Monev 2015	0,00	0,00		

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan/Spesies	Metoda Pengambilan Data
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)					
		Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember		Inventarisasi BBKSDA Jawa Timur tahun 2014	20	20	Monev 2015	0,00		
		Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kaloloro dan Blok Kaliganteng	35	Invent tahun 2015	5	5	Monev 2015	0,00		
5	Owa	Hylobates agilis albibarbis	BTN Gunung Palung	Stasiun riset cabang panti	2100	Laporan penelitian di stasiun cabang panti tahun 2014	21	25		19,05	19,05	Line transek
6	Orangutan	Pongo pygmaeus	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga Pinoh)	9889,47	Invent tahun 2014	25	27	Monitoring Agustus 2015	8,00	-23,39	Sensus sarang dengan metode line transek
		Pongo abelii	BKSDA Aceh	kawasan CA Hutan Pinus Jantho	14027	Invent tahun 2014	55	12	Monitoring hingga Juni 2015	-78,18		Sensus
		Pongo pygmaeus wrumbii	BTN Gunung Palung	Stasiun riset Cabang Panti	2100	Monitoring populasi OU tahun 2014	63	63		0,00		Sampling dengan line transek
7	Bekantan	Nasalis larvatus	BTN Gunung Palung	Sungai Batu Barat-Matan	260	Monitoring tahun 2014	455	458		0,66	0,66	Perjumpaan langsung dengan sensus
8	Komodo	Varanus komodoensis	BBKSDA NTT	Pulau Ontobe TWA 17 Pulau	660	Invent tahun 2014	6	22	Mar-15	266,67	266,67	Konsentrasi dengan camera trap
9	Jalak Bali	Leucopsar rothschildi	BTN Bali Barat	Teluk Brumbun	77,707 - 91,312	Invent Balai tahun 2014	7	8		14,29	14,29	Konsentrasi dan penjelajah
10	Maleo	Macrocephalon maleo	BTN Boganinani Wartabone	Tambun/SPTN Wilayah II Doloduo	5	Invent tahun 2014	168	349		107,74	133,74	Point count dan line transek
			BTN Boganinani Wartabone	Muara Pusian/SPTN Wilayah I Suwawa	4	Invent tahun 2014	156	197		26,28		Point count dan line transek
			BTN Boganinani Wartabone	Hungayono/SPTN Wilayah I Suwawa	7	Invent tahun 2014	122	448		267,21		Point count dan line transek
11	Babi Rusa	Babyrousa babirusa	BTN Boganinani Wartabone	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo	20	Invent tahun 2014	3	3		0,00	12,82	Strip transek

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan/Spesies	Metoda Pengambilan Data
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)					
		Babyrousa babirusa	BTN Boganimani Wartabone	Lokasi Ongka Desa Iolanan/SPTN Wilayah III Maelang	20	Invent tahun 2014	26	10		-61,54		Strip transek
		Babyrousa babirusa	BTN Boganimani Wartabone	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa	20	Invent tahun 2014	10	20		100,00		Strip transek
12	Anoa	Bubalus quarlesi	BTN Boganimani Wartabone	Gunung Imandi/SPTN Wilayah III Maelang	20	Invent BTN Tahun 2014	19	17		-10,53	-42,62	Line transek
		Bubalus depressicornis	BTN Boganimani Wartabone	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo	16	Invent BTN Tahun 2014	25	9		-64,00		Line transek
		Bubalus depressicornis	BTN Boganimani Wartabone	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa	20	Invent BTN Tahun 2014	15	7		-53,33		Line transek
13	Elang	Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi		Invent BBKSDA tahun 2014	3	3	Monev tahun 2015	0,00	0,00	
		Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Cagar Alam Gunung Picis, Kabupaten Ponorogo			3	3	Monev tahun 2015	0,00		
		Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Blok Pancur, Perkebunan Kaliasat-Jampit, PTPN XII, Situbondo		Invent BBKSDA tahun 2014	5	5	Monev tahun 2015	0,00		
14	Tarsius	Tarsius fuscus	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sungai Pattanuang, luas 86,75 Ha	86,75	Invent tahun 2014	82	86	Monitoring 2015	4,88	4,88	Line transek
15	Monyet Hitam Sulawesi	Macaca nigra	BTN Bantimurung Bulusaraung	Karaenta (kelompok), luas 29,27 Ha	29,27	invent tahun 2014	31	34	Monitoring 2015	9,68	9,68	Concentration count
							Rata-rata Peningkatan Populasi Satwa			26,89		

LAMPIRAN 6

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PER SATKER
DI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	%
A	Satker Pusat			
1	Setditjen KSDAE	146.411.378.000	107.249.026.592	73,25
2	Direktorat PKH	2.156.510.000	2.066.018.874	95,80
3	Direktorat PPH	2.516.224.000	2.383.943.290	94,74
4	Direktorat KKH	2.644.280.000	2.540.146.219	96,06
5	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	3.049.392.553	96,95
6	Direktorat PJLKKHL	2.910.128.000	2.882.975.699	99,07
	Jumlah Satker Pusat	159.783.752.000	120.171.503.227	75,21
B	Balai Besar/Balai KSDA			
7	BBKSDA Jawa Barat	41.346.794.000	39.673.300.035	95,95
8	BBKSDA Jawa Timur	30.742.266.000	28.927.061.565	94,10
9	BBKSDA Sumatera Utara	36.451.490.000	33.942.640.154	93,12
10	BBKSDA Riau	29.328.205.000	25.958.539.313	88,51
11	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	26.080.462.000	24.384.307.847	93,50
12	BBKSDA Sulawesi Selatan	33.995.684.000	32.179.660.561	94,66
13	BBKSDA Papua	30.545.510.000	27.135.776.677	88,84
14	BBKSDA Papua Barat	22.754.217.000	21.056.999.245	92,54
15	BKSDA DKI Jakarta	24.509.557.000	22.396.440.794	91,38
16	BKSDA Jawa Tengah	19.823.342.000	18.012.939.392	90,87
17	BKSDA DI Yogyakarta	17.089.070.000	15.989.257.941	93,56
18	BKSDA Nangroe Aceh Darussalam	18.154.710.000	16.842.272.630	92,77
19	BKSDA Sumatera Barat	15.733.436.000	13.945.068.895	88,63
20	BKSDA Jambi	18.622.185.000	14.160.869.566	76,04
21	BKSDA Sumatera Selatan	33.965.199.000	30.085.866.884	88,58
22	BKSDA Lampung	17.633.187.000	16.404.171.090	93,03
23	BKSDA Kalimantan Barat	29.937.830.000	27.514.739.995	91,91
24	BKSDA Kalimantan Tengah	29.648.628.000	25.086.146.784	84,61
25	BKSDA Kalimantan Selatan	17.997.140.000	16.462.934.733	91,48
26	BKSDA Kalimantan Timur	22.132.246.000	19.814.969.583	89,53
27	BKSDA Sulawesi Utara	14.906.572.000	13.303.626.251	89,25
28	BKSDA Sulawesi Tengah	17.780.177.000	15.476.784.640	87,05
29	BKSDA Sulawesi Tenggara	22.242.677.000	19.503.123.364	87,68
30	BKSDA Maluku	17.307.545.000	15.819.973.867	91,41
31	BKSDA Bali	17.260.719.000	15.644.096.270	90,63
32	BKSDA Nusa Tenggara Barat	22.350.404.000	20.948.227.098	93,73
33	BKSDA Bengkulu	19.480.475.000	18.760.100.362	96,30
	Jumlah Balai Besar/Balai KSDA	647.819.727.000	589.429.895.536	90,99
C	Balai Besar/Balai Taman Nasional			
34	BBTN Gunung Gede Pangrango	27.163.856.000	26.149.378.536	96,27
35	BBTN Bromo Tengger Semeru	25.383.092.000	24.192.053.683	95,31
36	BBTN Gunung Leuser	32.366.034.000	31.097.270.967	96,08
37	BBTN Kerinci Seblat	27.242.532.000	26.578.769.446	97,56
38	BBTN Bukit Barisan Selatan	21.194.780.000	20.242.783.885	95,51
39	BBTN Betung Kerihun	17.514.873.000	16.491.566.076	94,16
40	BBTN Lore Lindu	20.419.727.000	19.080.652.397	93,44
41	BBTN Teluk Cenderawasih	21.807.887.000	20.183.633.350	92,55

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	%
42	BTN Kepulauan Seribu	15.442.577.000	13.831.864.948	89,57
43	BTN Gunung Ciremai	11.695.306.000	11.170.100.889	95,51
44	BTN Gunung Halimun Salak	19.660.814.000	18.915.198.674	96,21
45	BTN Gunung Merbabu	10.839.401.000	10.309.639.373	95,11
46	BTN Karimun Jawa	12.819.647.000	12.203.493.052	95,19
47	BTN Gunung Merapi	12.349.157.000	11.494.158.989	93,08
48	BTN Baluran	13.983.090.000	13.374.805.040	95,65
49	BTN Meru Betiri	13.679.895.000	12.977.455.867	94,87
50	BTN Alas Purwo	17.760.051.000	16.253.425.004	91,52
51	BTN Batang Gadis	10.274.227.000	9.180.645.572	89,36
52	BTN Siberut	12.846.103.000	11.381.071.863	88,60
53	BTN Tesso Nilo	9.993.987.000	8.476.995.160	84,82
54	BTN Bukit Tigapuluh	13.520.136.000	11.158.758.487	82,53
55	BTN Bukit Duabelas	9.154.485.000	8.735.759.784	95,43
56	BTN Berbak	15.648.709.000	14.649.085.009	93,61
57	BTN Sembilang	10.184.820.000	9.464.297.153	92,93
58	BTN Way Kambas	29.602.622.000	28.115.133.035	94,98
59	BTN Danau Sentarum	12.359.130.000	10.701.443.119	86,59
60	BTN Gunung Palung	12.340.944.000	11.294.153.481	91,52
61	BTN Bukit Baka Bukit Raya	11.641.796.000	10.835.488.752	93,07
62	BTN Tanjung Puting	15.703.610.000	14.425.849.187	91,86
63	BTN Sebangau	11.103.936.000	10.486.853.280	94,44
64	BTN Kutai	18.116.847.000	16.539.703.646	91,29
65	BTN Bogani Nani Wartabone	19.590.658.000	19.043.255.587	97,21
66	BTN Bunaken	10.835.358.000	10.064.801.564	92,89
67	BTN Kepulauan Togean	8.499.742.000	7.753.736.989	91,22
68	BTN Bantimurung Bulusaraung	16.117.499.000	14.768.475.082	91,63
69	BTN Taka Bonerate	12.701.474.000	11.609.390.615	91,40
70	BTN Rawa Aopa Watumohai	17.151.999.000	16.549.121.403	96,49
71	BTN Wakatobi	13.027.220.000	11.744.221.012	90,15
72	BTN Manusela	11.487.286.000	10.602.113.466	92,29
73	BTN Bali Barat	20.015.201.000	19.044.969.592	95,15
74	BTN Gunung Rinjani	16.541.257.000	15.141.803.328	91,54
75	BTN Komodo	14.767.420.000	13.283.515.211	89,95
76	BTN Laiwangi Wanggameti	10.921.800.000	9.936.028.434	90,97
77	BTN Manupeu Tanadaru	10.423.604.000	10.130.275.841	97,19
78	BTN Kelimutu	11.027.965.000	10.007.884.373	90,75
79	BTN Lorentz	19.354.037.000	17.750.534.972	91,71
80	BTN Wasur	15.378.546.000	12.576.286.249	81,78
81	BTN Aketajawe Lolobata	11.046.933.000	10.435.751.567	94,47
82	BTN Ujung Kulon	19.185.554.000	18.818.505.906	98,09
83	BTN Kayan Mentarang	11.388.323.000	10.079.696.435	88,51
	Jumlah Balai Besar/Balai Taman Nasional	783.275.947.000	729.331.855.330	93,11
	Total Ditjen KSDAE	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45